

**BAB III**

**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN**

**KEUANGAN DAERAH**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

**3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014**

**1. Kondisi Perekonomian Global**

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi dunia. Pada tahun 2013, kondisi perekonomian dunia secara perlahan membaik yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian Negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diprediksikan akan masih tetap tinggi hingga tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk harga minyak mentah dunia. Pada tahun 2010-2012, kondisi perekonomian dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis subprime mortgage di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan perusahaan melalui pemberian bailout yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012, perekonomian dunia kembali tertekan dengan permasalahan fiskal yang terjadi di kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit fiskal yang lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar, membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi krisis keuangan Eropa. Pada tahun 2012, pertumbuhan

perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh: (1) Lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (2) Berlanjutnya krisis keuangan Eropa; dan (3) Melemahnya perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia.

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada tahun 2013, menurun signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun demikian, investasi meningkat sebesar 5,5 persen. Tumbuhnya investasi di Amerika Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank sentral (The Fed) yang akan melakukan pengurangan stimulus moneter (Tapering Off) pada pertengahan tahun 2014, sehingga dana-dana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan kembali ke Amerika Serikat. Sedangkan belanja pemerintah pada tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan keputusan Kongres yang berencana mengetatkan anggaran belanja pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi. Sementara itu, perekonomian negara-negara di kawasan Euro (EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat hutang sebagian negara di kawasan Euro juga menurun, setelah sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari GDP, menurun dari triwulan sebelumnya yang besarnya 92,7 persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar. Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asiaterkendala oleh masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun 2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999. Perlambatan ini merupakan dampak dari reformasi struktural yang dijalankan pemerintah Cina. Cina saat ini sedang memprioritaskan kestabilan ekonomi dibandingkan pertumbuhan yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target belanja konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang

tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan, dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi tahun terberat bagi India. Pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2013 hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus menjadi hambatan pada pertumbuhan PDB India secara keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen. Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh komoditi dunia menuju ke titik tertingginya pada tahun 2011. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya perlambatan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia mengakibatkan indeks harga komoditi dunia menurun drastis. Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar 87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar 127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7. Laju inflasi pada beberapa negara dunia menurun seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negara-negara maju dan 6,0 persen pada negara berkembang. Harga komoditi dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada tahun 2011. Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama non-energi, laju inflasi pada tahun 2012 mengalami penurunan baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok negara maju. Harga komoditi yang terus mengalami penurunan mengakibatkan laju inflasi kembali menurun pada tahun 2013. Laju inflasi mencapai 1,4 persen di kelompok negara maju dan 6,0 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2013. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global mengalami penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa. Indeks perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa

mengalami penurunan. Kemudian, adanya ketidakpastian akan pengurangan stimulus yang akan dilakukan oleh The Fed sepanjang tahun 2013 menjadikan indeks perdagangan saham di Amerika dan Eropa berfluktuasi, walaupun trennya meningkat. Sedangkan indeks perdagangan saham beberapa negara di kawasan Asia cenderung stabil. Pada akhir tahun 2013, indeks Hangseng Hongkong, STI Singapura, dan IHSG Indonesia masing-masing mencapai 23.306, 3.167, dan 4.274. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya data tenaga kerja Amerika Serikat memberikan ekspektasi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat sehingga memberi dorongan peningkatan pada beberapa indeks saham negaranegara maju. Pada akhir tahun 2013, indeks DJIA New York, Nikkei Tokyo, dan FTSE London masing-masing naik sebesar 26,5 persen, 14,4 persen, dan 56,7 persen dibandingkan akhir tahun 2012. Secara keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,0 persen. Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6 persen.

## **2. Kondisi Perekonomian Nasional**

Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut. **Pertama**, upaya keras pemerintah dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian nasional pada kondisi: (1) terus menguat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mencapai hampir 6 persen; (2) secara fundamental mampu dan kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 5,8 persen). **Kedua**, tercapainya pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal

dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh: (1) melemahnya permintaan dunia yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia; dan (2) melemahnya harga komoditi internasional, dimana komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi. Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal, yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2013. **Ketiga**, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi dengan meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional, terutama disebabkan oleh isu tapering off sejak pertengahan tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan Quantitative Easing (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska Krisis Global Lehman Brothers. Isu tapering off tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD 24,9 miliar pada tahun 2012. Untuk menyelesaikan ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah telah meluncurkan Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. **Pertama**, mendorong foreign direct investment (FDI) dengan kebijakan mengurangi hambatan investasi; penyederhanaan prosedur, dan melakukan revisi terhadap daftar investasi negatif. **Kedua**, memperbaiki neraca transaksi berjalan, dengan kebijakan keringanan pajak untuk produk berorientasi ekspor; memberlakukan pajak untuk impor barang mewah; serta meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam upaya mengurangi impor. **Ketiga**, mendorong kesempatan kerja dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor labor intensive, mengurangi hambatan pada lokasi kawasan khusus, dan melakukan revisi terkait penetapan kebijakan upah minimum. **Keempat**, mengurangi inflasi, terutama terkait dengan kebijakan penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan hortikultura. Pada Triwulan IV tahun 2013 perekonomian global

mulai menunjukkan perbaikan. Perkembangan sampai akhir 2013 menunjukkan bahwa membaiknya kondisi ekonomi global dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan kawasan Eropa, Cina dan India, yang antara lain ditunjukkan oleh: (1) terjadinya perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan konsumsi AS dan Eropa; (2) membaiknya perekonomian Jepang yang ditopang oleh kinerja sektor manufaktur, dimana angka PMI Manufaktur meningkat mencapai angka tertinggi selama hampir 4 tahun; (3) peningkatan kinerja ekonomi Cina yang didukung kinerja manufaktur Cina yg sedang ekspansif; dan (4) perekonomian India yang telah menunjukkan perbaikan pada Semester II tahun 2013 yang ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor dan sektor industri. Paska Paket 23 Agustus 2013 yang disertai dengan membaiknya perekonomian global telah mendorong perbaikan neraca pembayaran pada Triwulan IV tahun 2013 yang ditunjukkan oleh surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah dalam tiga triwulan terakhir mengalami defisit. Perbaikan neraca pembayaran ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang menurun cukup tajam menjadi USD4,0 miliar (1,98 persen PDB), jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang besarnya USD8,5 miliar (3,85 persen PDB). Penurunan defisit transaksi berjalan ini terutama ditopang oleh naiknya surplus neraca perdagangan barang, yang bersumber dari bertambahnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan semakin menyempitnya defisit neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas kembali mengalami pertumbuhan yang positif (3,8 persen, y-o-y) didukung oleh kenaikan ekspor manufaktur yang sejalan dengan meningkatnya permintaan dari Amerika Serikat dan Jepang; sementara itu pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi sejalan dengan terjadinya penurunan permintaan domestik. Ditengah masih berlangsungnya ketidakpastian global, transaksi modal dan finansial Triwulan IV tahun 2013 mencatat adanya surplus sebesar USD9,2 miliar yang meningkat dibandingkan surplus sebesar USD5,6 miliar pada triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus transaksi modal finansial terutama ditopang oleh meningkatnya penarikan pinjaman luar negeri swasta dan adanya penarikan

simpanan bank domestik di luar negeri. Selain itu, arus modal langsung asing tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya akibat divestasi beberapa perusahaan PMA. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus, meskipun menurun akibat berkurangnya penempatan nonresiden di pasar saham domestik. Terkait dengan semakin membaiknya neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut, cadangan devisa yang mengalami penurunan menjadi sebesar USD95,1 miliar pada Triwulan III tahun 2013 dibanding sebesar USD112,8 miliar pada Triwulan IV tahun 2012, kemudian kembali naik pada 30 April 2014 hingga mencapai sebesar USD105,6 miliar. Ditengah memburuknya (1) perekonomian global sebagai lanjutan krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak akhir 2011; (2) isu tapering off di Amerika Serikat sejak pertengahan 2013; (3) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan ketidakseimbangan eksternal (4) inflasi yang tinggi paska kenaikan BBM bersubsidi; (5) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang diikuti oleh berkurangnya kredit perbankan; ekonomi Indonesia masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen). Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 ini utamanya disebabkan oleh: (1) turunnya pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding 9,7 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh turunnya investasi non bangunan yang mempengaruhi hasrat melakukan investasi dikarenakan turunnya harga komoditi internasional; (2) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu 2,0 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya harga komoditi internasional. Masih tetap tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 didorong oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Meskipun terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3

persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh: (1) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi; serta (2) kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan BI dalam rangka menstabilkan harga hingga inflasi kembali ke harga normal sampai dengan akhir tahun 2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh pengeluaran pemerintah yang tumbuh sebesar 4,9 persen dibanding tahun 2012 (1,3 persen). Selanjutnya, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar 1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya 6,7 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2013 didorong oleh: (1) sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,5 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan; (2) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin & peralatannya; (3) sektor tersier tumbuh 7,0 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun 2012, yaitu USD 3.583,2 (Rp 33,5 juta). Tahun 2014 diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (1) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan aman dan tertib; (2) terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter; (3) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) membaiknya perekonomian dunia; (5) dengan asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 5,3 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.

### **3. Kondisi Perekonomian Provinsi Banten**

Kondisi perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, juga ikut dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti lambatnya penyelesaian krisis keuangan Zona Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat akibat permasalahan utang dan fiskal di Amerika Serikat, serta kuatnya gejolak harga



komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian, ketahanan ekonomi di Provinsi Banten secara umum masih terjaga yang tercermin dari terjaganya kondisi indikator kinerja pembangunan daerah di bidang perekonomian seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, dan investasi.

1) LPE

LPE Provinsi Banten menunjukkan trend yang terus meningkat. Tahun 2010 LPE Provinsi Banten adalah sebesar 6,11 meningkat mencapai 6,39% pada tahun 2011, tetapi pada tahun 2012 mengalami perlambatan menjadi 6,15%, kemudian mengalami perlambatan menjadi 5,66% pada tahun 2013, namun demikian masih dalam koridor target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Diharapkan seiring dengan pemulihan dampak krisis keuangan global, yang juga berdampak pada kapasitas produksi perusahaan-perusahaan besar di Banten, maka LPE pada tahun 2014 diperkirakan akan mengalami kecenderungan positif yaitu sebesar 6,6-6,8%.

2) Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Laju inflasi tahun 2013 (Persentase perubahan IHK Bulan Desember 2013 terhadap IHK Bulan Desember 2012) sama dengan Inflasi “Year on Year” sebesar 9,65%.

3) Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dari tahun ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten adalah sebesar 751.000 atau 7,46%, turun menjadi 690.874 orang atau 6,26% pada tahun 2011, dan kembali turun menjadi 648.254 orang atau 5,71% pada tahun 2012. Namun demikian, pada September 2013, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten kembali meningkat menjadi 682.710 orang atau sebesar 5,89%.

4) Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari tahun ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 TPT di Provinsi

Banten adalah sebesar 14,16%, turun menjadi 13,06% pada tahun 2011, pada tahun 2012 turun menjadi 10,74%.dan kembali turun menjadi 9,9% pada tahun 2013.

#### 5) PDRB

Angka PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan grafik yang terus meningkat. Meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku sejalan pula dengan meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan. Nilai nominal PDRB Banten triwulan III – 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 63,21 triliun atau bertambah Rp. 3,54 triliun dari triwulan sebelumnya, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp.26,88 triliun, bertambah Rp. 557,55 miliar dari triwulan sebelumnya. Dengan demikian, sampai dengan triwulan III – 2013, PDRB Banten Atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing sudah mencapai Rp. 180,56 triliun dan Rp. 78,97 triliun.

Sumber pertumbuhan  $q$  to  $q$  berasal dari industri pengolahan (0,52 persen), sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (0,52 persen), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,48 persen). Secara  $y$  on  $y$ , sumber pertumbuhan berasal dari sektor industri pengolahan (2,28 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,23 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi (0,76 persen).

Menurut penggunaannya, PDRB Banten atas dasar harga berlaku pada triwulan III tahun 2013 sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga termasuk konsumsi lembaga non profit yaitu sebesar Rp.28,42 triliun dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp. 22,50 triliun. Kemudian sebanyak Rp. 3,24 triliun digunakan untuk Konsumsi Pemerintah dan perubahan stok sebesar Rp. 282,78 miliar. Nilai transaksi ekspor Banten pada triwulan ini sebesar Rp. 55,68 triliun, sedangkan nilai impor sebesar Rp.46,91 triliun. Sehingga net ekspor Banten masih mengalami surplus senilai Rp. 8,78 triliun.

## 6) Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan sebagai pengeluaran barang modal yang diarahkan untuk menunjang kegiatan produksi atau perluasan produksi. Ini menjadikan investasi mempunyai *multiplier effect* yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi sisi konsumsi. Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional. Kinerja investasi diperkirakan meningkat tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto pada komponen PDRB Banten dari 8,39% pada tahun 2011 menjadi 15,37% pada tahun 2012.

Belum stabilnya kondisi pemulihan perekonomian dunia juga masih dirasakan dampaknya pada perlambatan kinerja perekonomian Banten. Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan III 2013 ini melambat hingga 2,12 persen (q to q) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,15 persen. Pada triwulan ini laju pertumbuhan ekonomi nyaris hanya didorong oleh komponen konsumsi domestik, dimana konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,54 persen, konsumsi pemerintah sebesar 13,44 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11,85 persen, ekspor sebesar 0,77 persen, serta impor sebesar 0,34 persen. Sedangkan komponen perubahan inventori mengalami kontraksi sebesar (12,98) persen.

Berdasarkan data BKPM RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten tahun 2013 jauh melebihi tahun 2012. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2013 mencapai 592 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 3.720,2 juta, sementara itu tahun 2012 hanya sebanyak 405 proyek dengan nilai USD 2.716,3 juta atau terdapat peningkatan sebanyak 187 proyek atau senilai USD 1.003,9 juta. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 66 proyek pada tahun 2012 (Rp 5,117,5 milyar) menjadi sebanyak 100 proyek (senilai Rp 4.008,66 milyar) pada tahun 2013. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten

cenderung berasal dari investor luar negeri. Selanjutnya, upaya peningkatan investasi melalui perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri.

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN**  
**di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013**

| Tahun | PMDN   |                           | PMA    |                        | Total Investasi PMA dan PMDN Investasi (rupiah) |
|-------|--------|---------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------|
|       | Proyek | Investasi (milyar rupiah) | Proyek | Investasi (US\$. Juta) |                                                 |
| 2010  | 75     | 5.852,6                   | 280    | 1.544,2                | 19.710.000.000.000                              |
| 2011  | 68     | 4.298,6                   | 300    | 2.171,7                | 25.544.400.000.000                              |
| 2012  | 66     | 5,117.5                   | 405    | 2,716.3                | -                                               |
| 2013  | 100    | 4.008,66                  | 592    | 3.720,2                | -                                               |

*Sumber: BKPM RI Tahun 2013*

Perkembangan investasi secara real dapat dilihat juga dari neraca perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten. Jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum di Banten pada tahun 2012 sebesar 90,946 trilyun rupiah dan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek sebesar 106,191 trilyun rupiah. Hal ini dapat disimpulkan terjadi aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke wilayah Provinsi Banten sebesar 15,245 trilyun rupiah.

Investasi terbesar berada di Kabupaten Tangerang, dimana pinjaman berdasarkan lokasi proyek sebesar 77,128 trilyun rupiah dan dana pihak ketiga sebesar 32,665 trilyun rupiah, sehingga jumlah investasi yang masuk sebesar 44,463 trilyun. Investasi terbesar kedua berada di Kota Cilegon, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek sebesar 15,738 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak ketiga sebesar 2,507 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk sebesar 13,231 trilyun rupiah. Investasi terbesar ketiga berada di Kabupaten Serang, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank umum sebesar 11,761 trilyun rupiah, sementara dana

simpanan pihak ketiga sebesar 3,765 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk sebesar 7,996 trilyun rupiah.

Investasi mengalir juga ke Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, dimana nilainya masing-masing sekitar 3 trilyun rupiah. Walaupun Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang aktivitas ekonomi utamanya di sektor pertanian, terjadi pula peningkatan investasi yang relatif besar dibandingkan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga yang hampir sepuluh kali lipat, dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Lebak sebesar 971 miliar rupiah dan posisi pinjaman sebesar 4,219 trilyun rupiah. Dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Pandeglang sebesar 1,397 miliar rupiah, sementara posisi pinjaman yang diberikan bank umum sebesar 4,658 trilyun rupiah.

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015**

#### **1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global**

Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut.

**Pertama**, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.

**Kedua**, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (1) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (2) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. **Ketiga**, Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015,

yaitu: (1) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) harga komoditas dunia masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (3) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (1) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (2) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (3) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2015.

## **2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional**

Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok yang dihadapi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

### **1) Memantapkan Perekonomian Nasional.**

Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi;

## 2) Menjaga Stabilitas Ekonomi.

Dorongan akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun nonmigas, serta pengendalian arus modal;

## 3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan.

Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat dan terpadu.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 persen, lebih tinggi dari sasaran pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,5 persen. Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 5,5 persen dan 4,6 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 1,6 persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,1 persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sekitar 1,8 persen. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian

diperkirakan dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 3,5 persen, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,8 persen dan sektor pertambangan dan penggalan diperkirakan tumbuh sekitar 0,9 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar sekitar 5,5 persen; 6,5 persen; 5,7 persen; 10,0 persen; 7,4 persen; serta 5,4 persen. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,8 persen pada tahun 2015 membutuhkan investasi sebesar Rp 3.921,3 triliun.

Arah kebijakan di bidang moneter akan tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 – 5,0 persen, sementara itu nilai tukar ditargetkan berada pada kisaran Rp.11.500 – Rp. 12.000 per dolar AS. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan didorong agar diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan (financial inclusion). Beberapa hal penting terkait implementasi kebijakan moneter ke depan, diantaranya: (1) Pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (2) Kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan (3) Komunikasi yang



intensif antara BI dan Pemerintah dengan masyarakat sangat penting untuk menjangkar persepsi pasar; (4) Penguatan kebijakan struktural sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.

Penerimaan ekspor tahun 2015 diperkirakan meningkat sekitar 8,5 persen, didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang naik sekitar 6,8 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 6,1 persen, didorong oleh peningkatan impor non-migas yang naik sekitar 5,9 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2015 diperkirakan defisit sebesar USD19,9 miliar. Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD27,6 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD17,8 miliar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD11,9 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD2,1 miliar. Secara keseluruhan, terjadi surplus neraca pembayaran pada tahun 2015 yang diperkirakan mencapai USD 8,5 miliar sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 116,4 miliar.

Dalam tahun 2015, setelah terselenggaranya pemilihan anggota DPR/DPD, Presiden dan Kabinet yang baru diharapkan dapat lebih mendorong harapan atau ekspektasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Dengan menurunnya inflasi dan suku bunga perbankan dalam tahun 2015, pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan akan meningkat lagi, demikian pula dengan penerbitan dan perdagangan obligasi dan saham di bursa efek Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan surat berharga dalam tahun 2015 masih terbatas. Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan di pasar modal serta sistim perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya perkembangan pasar keuangan di dalam negeri.

### **Pengangguran**

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan dan Kemiskinan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai

kegiatan pembangunan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015.

### **3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Banten**

1) Tantangan perekonomian di Provinsi Banten pada tahun 2015 antara lain yaitu:

a. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun 2015 menjadi target kinerja prioritas, mengingat pada tahun 2013, beban angkatan kerja terbuka masih sebesar 9,9% ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu sebesar 15,7%. Sehingga beban nyata dalam penyediaan lapangan pekerjaan mencapai 4,1%. Daya saing ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi, yaitu sebesar 39 % atau sebanyak 1.807,3ribu orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP sebesar 866 ribu orang (19%), SLTA keatas sebesar 1.437,5 ribu orang (31%)sementara penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi sebesar 526,2 ribu orang yang terdiri dari pendidikan diploma 143,2 ribu orang (3,1%) dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 383 ribu orang (8,3%).

b. Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Banten pada bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89%) meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang (5,74%). Selama periode Maret 2013 - September 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 50,66 ribu orang (dari 363,80 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 414,46 ribu orang pada September 2013), sementara di daerah

perdesaan berkurang 24,20 ribu orang (dari 292,45 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 268,25 ribu orang pada September 2013).

Pada periode Maret-September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kenaikan. Kenaikan P1 maupun P2 di perkotaan cukup tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin terpuruk. Sementara itu, kondisi di perdesaan tidak terlalu berubah secara signifikan.

Selain itu, diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan utama penanggulangan kemiskinan seperti diantaranya pertumbuhan penduduk masih cukup besar, Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang semakin terbatas, Peluang usaha dan pengembangan usaha masyarakat miskin yang terbatas, Urbanisasi yang memperparah kemiskinan perkotaan (slum dan squatter), Rendahnya kualitas SDM, khususnya usia muda, Rendahnya penyerapan tenaga kerja sektor industri, Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar yang rendah, Belum tersedianya jaminan perlindungan sosial yang komprehensif, serta social exclusion (marginalisasi), seperti kepada penduduk: difabel, berpenyakit kronis, ilegal, dll.

Akibat kondisi kemiskinan saat ini dan tantangan ke depan diperlukan rencana khusus untuk percepatan penurunan kemiskinan-MP3KI melalui pendekatan perlindungan sosial yang universal, pengembangan pelayanan dasar, dan pengembangan penghidupan yang berkelanjutan melalui sinergitas program/kegiatan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sesuai kondisi wilayah. MP3KI ini dilakukan melalui strategi Perluasan jangkauan program-program bersasaran (*targeted*) untuk penduduk miskin dan rentan, Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan koridor pulau dan kawasan khusus, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) penanggulangan kemiskinan diseluruh kebijakan dan program pembangunan.

c. Porsi Investasi Domestik Masih Sangat Rendah

Berdasarkan Data Indef, 75% dari sektor investasi dikuasai asing, sementara investasi domestik cuma menyumbang 25%. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia semakin hari semakin menjauhkan rakyat dari sumber daya ekonominya sendiri.

d. Penanggulangan Ketimpangan Pendapatan

Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2012 GR sebesar 0,38, kemudian pada 2013 sudah meningkat menjadi 0,41. Artinya, ketimpangan pendapatan kian meningkat.

Dengan didasarkan pada konsep membangun kerjasama. Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai bidang yang mampu menggerakkan bidang lain melalui percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500 dan nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Syarat pencapaiannya adalah pertumbuhan ekonomi riil yang tinggi dan konsisten disertai pengendalian inflasi. Pertumbuhan ekonomi riil yang diharapkan sebesar 6,4-7,5 % pada tahun 2011-2014 dan 8,0-9,0% pada periode 2015-2025, sedangkan inflasinya ditekan hingga mencapai 3,0% pada tahun 2025. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi dengan dunia usaha baik investor domestik maupun mancanegara. Salah satunya dengan membuat regulasi yang memungkinkan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru. Untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, pembangunan ekonomi diarahkan pada 8 (delapan) program utama dan 22 kegiatan utama. Sebagai prasyarat terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru adalah peran aktif pemerintah pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha, reformasi kebijakan keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas

antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi, serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2) Prospek perekonomian di Provinsi Banten

Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah tahun 2015 mendatang, perlu memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi nasional tahun 2015. Perbandingan kondisi ekonomi makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2015 terlihat sebagaimana Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2015(%)**

| NO | URAIAN INDIKATOR               | REALISASI 2012 |          | REALISASI 2013 |          | TARGET 2014 |          | TARGET 2015 |          |
|----|--------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|    |                                | BANTEN         | NASIONAL | BANTEN         | NASIONAL | BANTEN      | NASIONAL | BANTEN      | NASIONAL |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | 6,15           | 6,23     | 5,66           | -        | 6,6-6,8     | 6,4-6,9  | 6,7-6,8     | 5,5-6,3  |
| 2  | Laju Inflasi                   | 4,37           | 4,3      | 9,65           | -        | 4,5 ± 1     | 5,0      | 4,5         | 3,0-5,0  |
| 3  | Penduduk Miskin                | 5,71           | 11,96    | 5,89           | 11,7     | 5,3-5,0     | 8,0-10,0 | 5,1-4,8     | 6,5-8,0  |
| 4  | Pengangguran Terbuka           | 10,13          | 6,1      | 9,9            | -        | 9,74        | 5,6-6,0  | 9,24        | 5,0-5,5  |

Sumber : BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan nasional yang telah dicapai, untuk indikator inflasi, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka di tahun 2015 berdasarkan trend/kecenderungan realisasi tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, perlu kerja keras untuk mencapai target-target yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-2017.

Pada tahun 2015, pembangunan perekonomian daerah Provinsi Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan ditunjang oleh kebijakan pengendalian inflasi dan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menengah. Dalam kaitan tersebut diatas, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi. Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan

prosedur perijinan, memberikan kemudahan kredit/pinjaman usaha terutama bagi kelompok usaha kecil menengah, mempersiapkan tenaga kerja terlatih di bidang industri, pemilihan komoditas unggulan untuk diproduksi massal yang dapat menciptakan forward linkage dan backward linkage yang besar bagi perekonomian masyarakat banten, meningkatkan penyediaan infrastruktur dan energi, dan lain-lain.

### **3.1.3 Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah dan Peningkatan Lapangan Kerja.**

Parameter keberhasilan pembangunan bukan hanya semata-mata besaran target Pertumbuhan ekonomi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses pertumbuhan ekonominya yang harus sehat. Sehat dari sisi pemerataan pembangunan antar wilayah, berkurangnya kesenjangan kesejahteraan dan bergerakaknya sektor riil serta tumbuhnya investasi. Belanja Pemerintah, khususnya belanja Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari kerangka pertumbuhan ekonomi diarahkan harus dapat menjadi akselerator bagi peningkatan investasi, peningkatan produktivitas daerah khususnya yang berbasis ekspor dan mengurangi ketergantungan akan barang-barang impor. Dengan demikian akan terjadi penambahan aliran modal dalam menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Penciptaan peningkatan produktivitas melalui akumulasi modal dari hasil peningkatan investasi dan perluasan pasar keluar daerah/ekspor akan makin meningkatkan permintaan atau penciptaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan.

Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi peningkatan produktivitas tetapi juga bagaimana belanja pemerintah dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang menjadi penghambat pertumbuhan. Belanja diarahkan pada aktivitas yang memiliki eksternalitas yang besar. Belanja pada sektor pendidikan diarahkan pada pendidikan sesuai permintaan pasar tenaga kerja, belanja pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat untuk menunjang peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Belanja penanganan kemiskinan tidak hanya sekedar jaring pengaman sosial seperti raskin, beasiswa, penanganan gizi buruk tapi diarahkan juga pada pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat dan menghilangkan kemiskinan masyarakat dan tidak lagi menjadi beban belanja yang tidak produktif.

Belanja pembangunan diarahkan pada upaya pengarahannya pertumbuhan ekonomi yang sehat. Untuk itu dibagi arahnya dua kategori belanja, yaitu *crisis action program* dan *development agent program*. Pembagian ini tentunya berdasarkan data atau fakta adanya potensi/kekuatan yang harus dieksplorasi dan disisi lain ada masalah-masalah yang harus ditangani secara khusus yang bersifat krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain sebagainya.

Kategori *crisis action program* adalah program rencana tindak untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya krisis dan perlu ditangani segera dan sebagai bagian dari kebijakan *pro poor*, *pro job* dan sekaligus juga *pro growth* dengan skala terbatas untuk kategori masyarakat ekonomi lemah. *Crisis action program* terbagi atas jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan pemberdayaan ekonomi (*injection up grade*). Jaring pengaman sosial diarahkan sebagai solusi sementara dalam mengatasi masalah-masalah sosial akibat adanya kemiskinan, seperti miskin, beasiswa pendidikan atau pendidikan gratis, pengobatan gratis, penanganan kekurangan gizi, bantuan benih gagal panen dan kegiatan lainnya, sedangkan pemberdayaan ekonomi lemah adalah program peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang berada pada kategori krisis atau prasejahtera menuju sejahtera dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tanpa tergantung pada pihak lain.

Kategori *development agent program* adalah program pembangunan yang diarahkan untuk menjadi akselerator atau pengungkit dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan yang memiliki *multiplier effect* atau dampak ganda yang besar, baik dalam sumbangannya terhadap penyediaan lapangan kerja (*pro job*) maupun dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). *Development agent* terbagi atas akselerator, *back up agent* dan *follower*. Akselerator adalah program kegiatan yang dirancang untuk menjadi daya tarik atau pengungkit bagi aktivitas ekonomi yang lain. Hal ini berupa kebijakan pro dunia usaha baik pemberian insentif maupun peningkatan iklim usaha yang baik. Secara umum target akhir adalah menjadikan Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif investasi. Contoh dari program akselerator pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), revitalisasi *logistic management*, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan industri (*industrial estate*), agropolitan, minapolitan, kawasan strategis Bojonegara dan pengembangan program tematik lain yang memiliki dampak ganda, seperti sistandu dan pengembangan pola pembiayaan usaha masyarakat. *Back up agent* adalah program

dari *development agent* yang berfungsi untuk mendukung terlaksananya program akselerator. Contoh dari program *back up agent* adalah seperti pengembangan konektivitas atau pembangunan jaringan jalan dan jembatan ke KEK atau ke pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan kelembagaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur lainnya. Posisi program *back up agent* sangat penting bagi keberlangsung program akselerator selama dunia usaha belum dapat melaksanakannya sendiri. *Follower* adalah program yang menjadi pengikut sebagai akibat dari adanya program akselerator. Program ini diantaranya adalah investasi pada BUMD yang diarahkan untuk terlibat bersama-sama dunia usaha lain dalam mengembangkan dampak program akselerator.

Keberhasilan kinerja belanja pemerintah pada masing-masing program tidak identik dengan besaran belanja/investasi pada masing-masing program. Karena belanja pemerintah tidak hanya sekedar dalam bentuk anggaran yang tercantum dalam APBN/APBD saja tetapi juga termasuk belanja yang sifatnya kebijakan yang kadangkala kinerjanya lebih besar, seperti belanja pada kebijakan penetapan KEK dan Kebijakan revitalisasi manajemen logistik.

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian Provinsi Banten telah mampu menunjukkan peningkatan yang signifikan dilihat dari meningkatnya indikator-indikator perekonomian makro, seperti: LPE, PDRB, perkembangan kinerja sektoral, pendapatan per kapita, laju inflasi, PAD dan struktur investasi daerah.

Secara umum kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2015, akan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*pro growth*) yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro job*), serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan (*pro poor*) sesuai dengan target RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, namun tetap memperhatikan pembangunan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi seperti terjadinya banjir (*pro environment*). Untuk itu kebijakan ekonomi yang akan ditempuh adalah melalui:

#### **1. Meningkatkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan.**

Peningkatan investasi akan diperkuat program konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan, baik kawasan industri, Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung, agropolitan, minapolitan, dan kawasan pusat pertumbuhan strategis lainnya. Dengan kondisi permintaan pasar investasi yang relatif tinggi, khususnya di sektor industri akan terakselerasi lebih cepat dengan dukungan



konektivitas pada simpul-simpul transportasi regional dan global, dukungan infrastruktur produksi seperti air baku dan listrik serta dukungan regulasi kebijakan yang membuat kompetitif dunia usaha.

Kebijakan ini merupakan kebijakan pembangunan ekonomi ruang. Beberapa pendekatan pembangunan berbasis ekonomi ruang telah dilaksanakan, seperti pengembangan agropolitan, minapolitan, penetapan pusat-pusat pertumbuhan, penetapan kawasan strategis, penetapan wilayah pembangunan, penetapan desa pusat pertumbuhan, dan lain sebagainya.

Kerangka yang dipakai adalah penetapan kawasan *growth pole* atau pusat pertumbuhan secara ruang geografis sekaligus sebagai *growth centre* atau pusat pertumbuhan aktivitas ekonomi. *Growth centre* dan *growth pole* ini diarahkan untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya/ hinterlandnya. Aktivitas ekonomi *growth centre* akan sangat tergantung dari kawasan hinterlandnya, demikian juga sebaliknya kawasan hinterland akan dapat berkembang apabila fungsi pelayanan oleh kawasan *growth centre* dilakukan secara optimal. *Growth centre* akan berfungsi sebagai pusat distribusi dan koleksi atau sebagai pusat transaksi perdagangan bagi hasil produksi kawasan hinterland dan sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku produksi kawasan hinterlandnya. Selain itu berfungsi pula menjadi pusat pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan. Penetapan *growth centre* diharapkan akan ada aktivitas *spread effects* (efek penjarangan) dalam bentuk *trickle down effect* berupa efek peningkatan kinerja aktivitas ekonomi di daerah hinterland. Namun demikian untuk beberapa aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu yang secara khusus menjadi *development agent* seperti kawasan industri, kawasan pariwisata akan menjadi kawasan produksi dan sebaliknya kawasan hinterlandnya menjadi kawasan pendukung untuk pelayanan seperti perdagangan, pemukiman dan aktivitas sosial. bahkan pemenuhan kebutuhan bahan baku.

Pusat pertumbuhan karena fungsi spesifik seperti kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan pariwisata dan lain sebagainya mempunyai wilayah pelayanan yang berbeda secara umum. Pusat pertumbuhan akan membentuk magnetisme ruang dan akan saling tarik menarik dengan pusat pertumbuhan lain. Penetapan leveling pusat pertumbuhan yang diarahkan akan membentuk pola yang harmonis dalam pola aliran barang dan sekaligus akan mengefisienkan investasi infrastruktur pelayanan oleh pemerintah. Keterhubungan antar pusat pertumbuhan dalam berbagai level akan menjadi

pengintegrasian dari magnetisme ruang. Unsur investasi infrastruktur jalan menjadi penyearah dalam pembangunan ekonomi berbasis tata ruang karena dengan adanya jalan penghubung akan terjadi kelancaran pola distribusi dan koleksi barang-barang yang bersifat ekonomis.

Sebagaimana proses pertumbuhan kota-kota dan kawasan-kawasan aktivitas ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ada yang terjadi secara alamiah dan ada pula yang dibentuk dan diarahkan sesuai dengan rancangan pembangunan ekonomi. Pembentukan pusat pertumbuhan baru harus diarahkan sesuai dengan mekanisme dan permintaan pasar investasi, tentunya harus diikuti dengan penetapan kebijakan insentif dalam menarik dunia usaha, dan didukung pula oleh kesiapan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk investasi dalam bentuk infrastruktur baik untuk aktivitas ekonomi maupun sosial pemerintahan. Untuk itu pasar investasi kawasan, mulai dari industri, pariwisata, minapolitan, agropolitan dan kawasan strategis lainnya yang telah tumbuh mulai dari pantai utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan bersambung ke wilayah barat sepanjang Selat Sunda mulai Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang sampai ke wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak.

Ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota di wilayah utara dengan wilayah selatan terjadi karena faktor aktivitas ekonomi yang tidak seimbangan. Pertumbuhan alamiah akan makin memperbesar “gap” pembangunan utara versus selatan. Dengan penetapan kota kecil Bayah, Malingping dan Panimbang sebagai pusat pertumbuhan yang “diarahkan” sebagai *growth centre* di wilayah selatan harus pula didukung dengan peningkatan infrastruktur ekonomi dan sosial sekaligus pula dirancang dengan aktivitas ekonomi yang diarahkan sebagai “*development agent*”. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah dan keindahan alam yang memukau maka *development agent* berupa pembangunan pariwisata dalam skala besar dan turunan aktivitas sumber daya alam akan menjadikan wilayah selatan yang akan datang menjadi lebih maju. Dukungan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan laut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota di wilayah selatan.

Pembangunan tata ruang bukan sekedar membentuk secara ekonomi tetapi sustainable development harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi dalam konsep pembangunan, khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup. Water management dalam keberlangsungan ekonomi sangat terkait dengan tata ruang. Di Provinsi Banten bukan sekedar pemeliharaan tetapi

sudah harus dalam taraf recovery untuk menyelesaikan masalah kebutuhan air yang sustainable. Posisi banjir dikala musim hujan dan kekeringan dimusim kemarau menjadi penanda kebutuhan pengaturan recovery tata ruang sebagai bagian dari *water management*. Disinilah salah satu fungsi koordinasi penggunaan/ pengendalian tata ruang, khususnya dalam land use planning demi pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam orientasi pandangan berbasis pusat pertumbuhan wilayah utara Provinsi Banten mulai dari Kabupaten Tangerang sampai ke Barat Cilegon, Anyer dan Merak akan menjadi pusat pertumbuhan terbesar yang menggerakkan ekonomi Provinsi Banten. Kekuatan pelabuhan, industri petro kimia, industri baja dan industri pengolahan lainnya akan menjadi *development agent* yang mengungkit *multiflier effect* aktivitas ekonomi lainnya. Untuk tumbuh sesuai dengan yang diharapkan maka pembangunan konektivitas dan daya dukung kawasan menjadi salah satu kebijakan pembangunan ekonomi.

## **2. Revitalisasi investasi.**

Pemerintah daerah yang berhasil secara ekonomi ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengikis pengangguran. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kondisi wilayah atau daerah secara ekonomi memiliki nilai kompetitif investasi atau dengan kata lain daerahnya memiliki daya saing ekonomi.

Pemahaman akan daya saing daerah tidak terlepas dari kompetisi antara daerah, bahkan harus memiliki daya saing secara global karena aktivitas ekonomi dunia sudah sangat sulit dibatasi oleh batasan administrasi negara, apalagi batasan provinsi dan kabupaten. Proteksi atas produksi dalam negeri hanya akan menyebabkan balasan proteksi atas barang-barang ekspor. Yang akan terjadi adalah persaingan yang tidak terelakan atas produksi lokal dengan asing baik didalam pasar lokal, regional maupun pasar internasional. Siapa yang memiliki produk yang kompetitif dialah yang akan menjadi market leader. Dan untuk menjadi market leader harus memahami kerangka *supply chains*, dimana pola *supply-demand* berada pada kesetimbangan yang baik yang menghasilkan biaya produksi yang efisien.

Dalam entitas ekonomi, *supply chains* Provinsi Banten tidak terlepas dari *supply chains* Nasional dan Global. Pola produksi dan pasar sudah tidak mengenal batasan administratif. Lebih dari seratus negara terlibat dalam kegiatan ekspor impor dengan Provinsi Banten. Sebagai bagian dari komunitas *supply chains*

ekonomi internasional, maka *brand image* Provinsi Banten dalam bidang ekonomipun, khususnya investasi telah tercatat di mata para investor masing-masing baik yang positif maupun yang negatif. Untuk itu kerangka *supply chains management* diterapkan sebagai bagian kerangka revitalisasi investasi yang memadukan pemilihan komoditas produk, kekuatan pasar, kerangka pembiayaan, dan logistik management dalam mengelola pembangunan perekonomian di Provinsi Banten untuk menjadikan brand images daerah yang kompetitif dalam menarik investasi. Beberapa variable yang diterapkan dalam konsep diantaranya : (1) Pemberdayaan produk lokal, (2) Peningkatan dan pengayaan Produk substitusi impor, (3) Perkuatan pasar lokal, (4) Revitalisasi dan restrukturisasi logistik management, (5) Revitalisasi pembiayaan, (6) Kemitraan usaha kecil, menengah dengan usaha besar dengan kerangka keterkaitan proses produksi dan pasar, (7) Revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi, (8) Reorientasi pasar ekspor dan (9) Peningkatan orientasi pasar domestik.

Variabel-variabel di atas pada dasarnya saling terkait dan membentuk sistem. Perbaikan pada satu variable akan memberikan kontribusi peningkatan perbaikan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi kalau secara bersama-sama memberikan kontribusi maka akan meningkatkan perbaikan ekonomi lebih signifikan.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini serangan produk asing khususnya dari negara China telah membanjiri pasar dalam negeri termasuk di Provinsi Banten. Permintaan pasar dalam negeri atas produk asing didasarkan atas harga yang murah dan barang yang berkualitas dan juga sebagian warga telah minded dengan barang-barang berlabel merk terkenal. Kecintaan atas produk dalam negeri telah luntur. Nasionalisme dikalahkan oleh hukum ekonomi. Namun demikian, hal ini akan memunculkan kesadaran baru bahwa produk dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tuan di negeri orang. Hukum ekonomi harus diikuti untuk menjadi market leader. Produk dalam negeri harus kompetitif. Efisiensi biaya produksi harus dilakukan. Pasar harus direbut. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan produk lokal. Pemberdayaan produk lokal mempunyai dimensi kinerja yang harus komprehensif. Berbagai sektor harus saling mendukung. Permodalan harus didukung oleh sektor pembiayaan, Perlu peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik teknis maupun management, perlu difasilitasi akses pasar dan akses bahan baku. Secara operasional, pemberdayaan produk

dapat dilakukan berdasarkan kasus perkasus sesuai dengan tingkat permasalahan. Pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari kegiatan ekspor impor menunjukkan nilai yang relatif kecil apabila dilihat dari sumbangan PDRB karena nilai impor mendekati nilai ekspor, sementara pertumbuhan ekonomi yang baik harus ditunjukkan dengan selisih ekspor yang besar dikurangi impor. Artinya ada nilai lebih *Location Quotient* dari hasil proses produksi berbanding dengan wilayah luar Banten. Pertambahan pendapatan dari selisih ekspor impor menjadikan pertambahan re-investasi di dalam wilayah Banten. Ironisnya komoditi ekspor impor yang terbesar di Provinsi Banten adalah dari komoditas Kimia dimana Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon sebagai pusat Industri Kimia terbesar di Indonesia.

Memperhatikan kondisi besaran barang-barang impor, khususnya yang terkait dengan bahan baku produksi industri, maka peningkatan dan pangayaan produk substitusi impor ke dalam konsep *supply chain management* yang tentunya akan memiliki kaitan dengan rancangan perkuatan pasar lokal, Revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi dan peningkatan orientasi pasar domestik. Besaran impor khususnya bahan baku industri akan menciptakan pasar investasi untuk substitusi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan sekaligus memperkuat pasar domestik. Kekuatan industri kimia hulu akan menciptakan rangkaian berbagai industri sampai ke konsumen. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus empat puluh juta merupakan pasar konsumsi yang sangat besar dan harus dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Provinsi Banten sebagai pusat industri kimia hulu dapat menjadi pusat pengembangan industri secara keseluruhan di Indonesia.

Orientasi pasar domestik atau pasar dalam negeri bagi industri-industri di Provinsi Banten harus menjadi target kinerja ekonomi karena jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi potensi pasar disatu sisi dan besaran impor atas barang-barang yang sebenarnya masih bisa diproduksi di dalam negeri masih sangat besar. Orientasi pasar domestik pada dasarnya merupakan konsep substitusi produk impor yang diperluas dari wilayah Provinsi Banten. Perbedaannya hanya terletak pada pemahaman data pasar domestik atas barang-barang impor. Kemampuan daya saing dengan barang impor dalam merebut pasar domestik di luar Provinsi Banten bukan hanya dari efisiennya biaya produksi di pabrik tetapi kemampuan efisiensi di *logistic cost* termasuk didalamnya biaya transportasi menjadi tantangan tersendiri karena di Indonesia

biayanya termasuk sangat mahal. Untuk itu manajemen logistik menjadi target fokus dalam kerangka *supply chain management*.

Pendekatan manajemen logistik sebagai bagian dari restrukturisasi efisiensi produktivitas daerah, baik dalam kerangka efisiensi produksi pada sektor riil maupun dalam kerangka ketahanan daerah, khususnya pangan. Kebijakan pembangunan revitalisasi manajemen logistik muncul berdasarkan fakta adanya *cost logistic* yang mahal di satu sisi tetapi pada sisi lain kapasitas infrastruktur logistik yang masih banyak tidak terpakai menjadi anomali tersendiri dalam struktur ekonomi di Provinsi Banten khususnya dalam aktivitas ekspor- impor. Dengan posisi geografis Selat Sunda sebagai sea line internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang banyak dilalui kapal niaga antar negara membuat Provinsi Banten pada posisi tawar *logistic* bisnis yang kompetitif, apalagi dengan potensi pasar produksi ekspor-impor yang besar dan infrastruktur jalan yang memadai. Demikian juga dalam siklus *supply demand* pada komoditas pangan terjadi anomali yang menyebabkan biaya tinggi karena system logistik yang belum masuk sebagai bagian dari siklus *supply chains management*.

Sejalan dengan itu pendekatan manajemen logistik yang banyak melibatkan stake holder menjadi agenda dalam mengimplementasikan Banten sebagai Gerbang Investasi yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif investasi. Deklarasi Gerbang Investasi harus diikuti pula dengan peningkatan Brand Image investasi di Provinsi Banten, dimana komparatif logistic cost sebagai penyuar dalam global image. Suara berita yang bersifat *good news* atau berita baik akan mendapat sambutan dunia usaha (investasi). *logistic cost* di Indonesia termasuk yang paling mahal di dunia, sementara logistik akan masuk dalam *variable cost* produksi yang harus dibayar konsumen. Persaingan harga sudah bukan lagi domain persaingan pengusaha tetapi sudah menjadi domain persaingan antar negara/pemerintah daerah karena peran pemerintah dan pemerintah daerah yang besar dalam sumbangannya untuk mereduksi biaya produksi di suatu daerah/negara, khususnya yang berkaitan dengan logistik dan fiskal. Kegagalan dalam mereduksi biaya logistik akan menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi, karena orientasi komoditas ekspor akan melemah bahkan pasar lokal akan dapat di rebut dan dipenuhi oleh barang-barang Impor.

Provinsi Banten sebagai daerah yang secara ekonomi tumbuh dan berkembang pesat dengan basis kegiatan industri termasuk industri berorientasi ekspor.

Kegiatan Industri telah menyumbang rata-rata sekitar 50% (lima puluh prosen) pada PDRB Provinsi Banten. Kegiatan industri yang berorientasi ekspor dan berbahan baku impor sebagian besar atau sekitar 85 % melalui outlet Pelabuhan Tanjung Priok, sementara yang melalui Pelabuhan di Provinsi Banten kurang dari 15 % sebagian besar barang curah di Pelabuhan Cigading milik PT. Krakatau Bandar Samudra. Dikatakan anomali ekonomi karena *variable cost logistic* ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih mahal dari pada ke Pelabuhan di Provinsi Banten, semisal Pelabuhan Merak Mas di Merak Cilegon. Selain itu kapasitas pelayanan Pelabuhan Merak Mas baru terpakai sekitar 5 % dari kapasitas terpasang. Seluruh infrastruktur pelabuhan telah siap. Pelayanan Bea cukai telah dilengkapi dengan sistem EDI (*Electronic Data Interchange*) dan pelayanan karantinapun telah tersedia.

Adanya anomali permasalahan logistik ekspor-impor di Provinsi Banten memperlihatkan bahwa adanya sesuatu hal yang tidak terkoneksi dalam uraian masalah ekonomi yang dihadapi mengingat *variable* harga dan kesiapan pelayanan telah pada kondisi yang kompetitif. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk menaikkan kinerja ekonomi yang signifikan.

Pada ketahanan pangan, tataran manajemen logistik menjadi sangat penting karena ketahanan pangan merupakan program strategis nasional yang harus dan dapat mengantisipasi kerawanan pangan dan kerawanan social. Kesiapan logistik pangan Provinsi dibentuk sebagai pelengkap ketahanan pangan nasional, dimana Provinsi Banten telah memiliki cadangan beras provinsi yang selalu dipelihara tingkat ketersediannya. Pada tingkat masyarakat dibentuk cadangan pangan pada lumbung-lumbung beras yang tersebar di sebagian wilayah dan akan terus dikembangkan menjadi ketahanan pangan lokal.

Ketahanan logistik pangan akan membantu mengendalikan tingkat inflasi, mengingat salah satu sumbangan terbesar inflasi dari bahan makanan dan makanan olahan. Dengan terkendalinya inflasi akan menjaga tingkat daya beli masyarakat dan sekaligus menyumbang pengurangan kemiskinan.

Menjaga tingkat inflasi sesuai dengan target kinerja. Tim Pengendali inflasi yang telah terbentuk pada tahun 2010 bertugas mengendalikan harga yang sekaligus memberikan pengaruh pada ketahanan tingkat daya beli masyarakat. Dengan terpeliharanya tingkat daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi akan mendorong tingkat permintaan. Pertumbuhan Ekonomi yang didorong tingkat konsumsi akan lebih terjaga lagi dengan mengendalikan tingkat inflasi.

Peningkatan investasi yang diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil khususnya di sektor primer adalah dengan merestrukturisasi dan merevitalisasi pembiayaan. Dengan konsep “pembiayaan pembangunan bukan hanya belanja pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota tetapi pembiayaan pembangunan merupakan resultante pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat”. Belanja pemerintah hanya bersifat stimulan, fasilitasi dan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha. keberhasilan pembangunan bukan diakibatkan oleh besarnya belanja pemerintah tetapi yang lebih penting adalah bagaimana belanja pemerintah tepat sasaran dalam menggerakkan lokomotif investasi dunia usaha dan investasi masyarakat. Keberhasilan ini salah satunya dapat dilihat dari bagaimana pergerakan uang dalam satu daerah. Pergerakan uang merupakan bukti kinerja dan dinamisasi aktivitas ekonomi. Pergerakan uang dapat kita lihat dari neraca lembaga keuangan seperti perbankan. Parameter-parameter yang terdapat dalam neraca perbankan dapat menjadi patokan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Memperbaiki dan memfasilitasi kinerja pada lembaga keuangan khususnya perbankan dapat menjadi perbaikan kinerja pembangunan. Terlebih lagi lembaga keuangan dapat menjadi alat penarik investasi yang signifikan apabila kinerja ekonomi di sektor riil di daerah bersangkutan makin berkembang. Dengan posisi seperti ini maka lembaga keuangan/ perbankan merupakan mitra strategis dalam pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung kinerja pembiayaan usaha mikro kecil yang memiliki keterbatasan akses dan konektivitas dengan lembaga pembiayaan, khususnya perbankan disatu sisi dan azas prudential atau kehati-hatian lembaga pembiayaan, maka perlu lembaga pendukung konektivitas dan intermediasi pembiayaan, yaitu Lembaga Penjamin Kredit Daerah dan Konsultan Keuangan Mitra Bank. Untuk itu sejak tahun 2013 telah dipersiapkan perusahaan penjaminan kredit daerah dan penyuluh pertanian, peternakan dan kehutanan serta yang lainnya yang berfungsi sebagai konsultan keuangan mitra bank dan pada tahun 2015 akan lebih diperkuat, termasuk perkuatannya melalui pendirian Bank Banten. Dengan pemantapan restrukturisasi dan revitalisasi pembiayaan akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan dari intermediasi investasi statis menjadi investasi dinamis, dari kredit konsumtif menjadi kredit investasi dan produktif.



Peningkatan Investasi pada sektor produksi berbasis produk substitusi impor sebagai bagian dari konsep peningkatan LPE didasarkan bahwa selisih ekspor dengan impor relatif kecil di Provinsi Banten, sehingga sumbangan yang besar dari ekspor tersedot oleh komoditas impor. Untuk itu dengan data dasar besarnya *backward effect* dan data komoditas impor, menjadi dasar dalam menarik investasi dan memproduksi komoditas tertentu. Peningkatan produk substitusi impor berarti mendayagunakan pasar domestik dengan memperkuat produksi domestik. Diharapkan melalui strategi ini laju pertumbuhan ekonomi di Banten dapat terus meningkat dan sekaligus memperbanyak lapangan kerja yang baru.

### **3.1.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah**

#### **1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Banten**

Perkembangan kondisi kemiskinan sampai dengan tahun 2013 dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Periode Maret – September 2013 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2013 mencapai 682.710 orang (5,89 persen), meningkat sebanyak 26,47 ribu orang (4,03 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656.243 orang (5,74 persen). Selama periode Maret-September 2013, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 50,66 ribu orang (13,93 persen), sementara di daerah perdesaan berkurang sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen). Terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September 2013, di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Selama Periode Maret 2013 – September 2013 inflasi umum relatif tinggi, yaitu sebesar 5,76% akibat kenaikan harga BBM pada bulan juni 2013.
- 2) Upah buruh konstruksi secara riil turun sebesar 3,15% dari Rp. 44.471,- menjadi Rp. 43.070,-

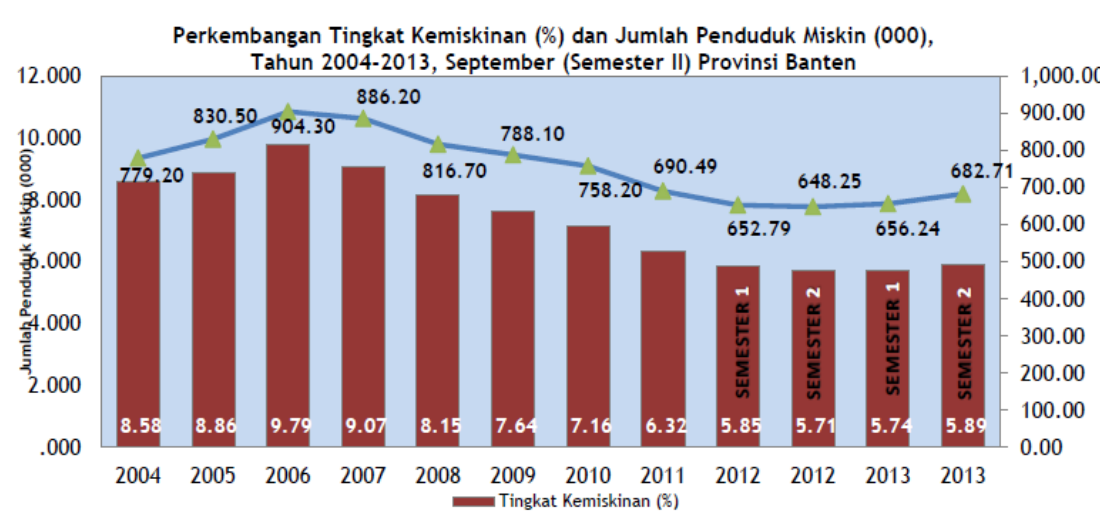
Sementara itu beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September 2013 di perdesaan adalah sebagai berikut:

- 1) Upah riil buruh pertanian meningkat dari Rp. 22.340,- menjadi Rp. 22.609,- pada September 2013.

2) Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian triwulan I ke triwulan II 2013 menunjukkan angka positif yaitu sebesar 2,11%.

Terkait dengan perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode Maret – September 2013 dapat di jelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini:

**Gambar. 3.1**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin**  
**di Provinsi Banten Tahun 2004 - 2013**



Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret-September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (**P1**) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (**P2**) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 0,695 pada Maret 2013 menjadi 1,021 pada September 2013. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan naik dari 0,158 menjadi 0,293 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (**P1**) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (**P2**) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan di perkotaan, hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk miskin di

perdesaan lebih baik di bandingkan dengan keadaan di perkotaan. Jika dilihat menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kenaikan P1 maupun P2 di perkotaan cukup tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin terpuruk. Sementara itu kondisi di Perdesaan tidak terlalu berubah secara signifikan.

## **2. Prinsip, Strategi dan Kelompok Penanggulangan Kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat daerah. Tim Penanggulangan kemiskinan ini bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan 4 (empat) prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif yaitu:

- 1) Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;
- 2) Peningkatan akses pelayanan dasar;
- 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
- 4) Pembangunan yang inklusif.

Mengacu pada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil dan;
- 4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pada level provinsi, penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya:

- 1) Kelompok program bantuan/perlindungan sosial berbasis keluarga (klaster 1). Tujuannya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin (antara lain: Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu/Jamsosratu, Bantuan Operasional Beras Miskin, Bantuan Siswa Miskin, dan Jaminan Kesehatan Daerah/Jamkesda).
- 2) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (klaster 2). Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3). Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- 4) Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (klaster 4) contohnya listrik desa.

### **3. Bidang Urusan dan Program Prioritas Pada Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014**

Rencana kerja penanggulangan kemiskinan tahun 2014 di Provinsi Banten memuat 11 urusan wajib dan 6 urusan pilihan (dari 25 urusan

wajib dan 8 urusan pilihan) yang mencakup 35 program (dari 78 program) pada RPJMD 2012-2017 seperti terlampir pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Program dan SKPD Penanggung Jawab Pada Rencana Kerja**  
**Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014**

| URUSAN WAJIB |                                               |    |                                                                             |                                     |
|--------------|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NO           | BIDANG URUSAN                                 | NO | PROGRAM                                                                     | SKPD                                |
| 1            | Pendidikan                                    | 2  | Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun                                      | Dindik                              |
|              |                                               | 3  | Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun                                  | Dindik                              |
|              |                                               | 6  | Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)                                   | Dindik                              |
| 2            | Kesehatan;                                    | 1  | Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak                                        | Dinkes                              |
|              |                                               | 2  | Pembinaan Upaya Kesehatan                                                   | Dinkes/ RSUD Banten                 |
|              |                                               | 3  | Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan                             | Dinkes                              |
|              |                                               | 4  | Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan                                        | Dinkes                              |
|              |                                               | 5  | Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan                  | Dinkes                              |
|              |                                               | 6  | Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat                               | Dinkes/ RSU Malingping/ RSUD Banten |
| 3            | Pekerjaan Umum                                | 3  | Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman                      | SDAP                                |
| 4            | Perumahan;                                    | 1  | Pembinaan dan Penataan Perumahan                                            | SDAP                                |
| 6            | Perencanaan Pembangunan                       | 2  | Pengendalian Pembangunan Daerah                                             | Bappeda                             |
| 11           | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; | 1  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                | BPPMD                               |
| 13           | Sosial                                        | 1  | Pemberdayaan Masyarakat Miskin                                              | Dinsos/ BPPMD                       |
|              |                                               | 2  | Rehabilitasi Sosial                                                         | Dinsos                              |
|              |                                               | 3  | Perlindungan dan Jaminan Sosial                                             |                                     |
|              |                                               | 4  | Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan                               | Dinsos/ Biro Kesra                  |
| 14           | Ketenagakerjaan;                              | 1  | Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja | Disnakertrans                       |
|              |                                               | 2  | Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha                     | Disnakertrans                       |
|              |                                               | 3  | Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja                                       | Disnakertrans                       |
| 15           | Koperasi dan usaha kecil dan menengah;        | 1  | Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM                              | Dinkop-UMKM                         |
|              |                                               | 2  | Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM                                    | Dinkop-UMKM                         |

|                       |                                                            |           |                                                                                                             |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                       |                                                            | 3         | Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM                                                | Dinkop-UMKM   |
| 21                    | Ketahanan pangan;                                          | 1         | Ketahanan Pangan Masyarakat                                                                                 | BKPP          |
| 22                    | Pemberdayaan masyarakat dan desa;                          | 1         | Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan                                                               | BPPMD         |
| <b>URUSAN PILIHAN</b> |                                                            |           |                                                                                                             |               |
| <b>NO</b>             | <b>BIDANG URUSAN</b>                                       | <b>NO</b> | <b>PROGRAM</b>                                                                                              | <b>SKPD</b>   |
| 1                     | Pertanian                                                  | 1         | Peningkatan Produksi, Produktivitas peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan                         | DKP, Distanak |
|                       |                                                            | 2         | Peningkatan daya saing dan pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan                 | DKP, Distanak |
|                       |                                                            | 4         | Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian                                                                | Distanak      |
|                       |                                                            | 3         | Pemberdayaan kelembagaan dan sumberdaya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan                     | DKP,Distanak  |
| 3                     | Energi dan Sumber Daya Mineral; Industri; Perdagangan; dan | 1         | Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi                                                                  | Distamben     |
|                       |                                                            | 2         | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi | Distamben     |
| 4                     | Pariwisata                                                 | 1         | Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata                                                                     | Disbudpar     |
| 5                     | Kelautan dan Perikanan                                     | 1         | Pengelolaan Sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil                                                  | DKP           |
| 6                     | Perdagangan                                                | 1         | Peningkatan dan pengembangan perdagangan                                                                    | Disperindag   |
| 7                     | Industri                                                   | 1         | Peningkatan daya saing industri                                                                             | Disperindag   |

#### 4. Target dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka ketepatan target sasaran dan efektivitas dari penanggulangan kemiskinan maka target dan sasaran penanggulangan kemiskinan di bagi kedalam kedua kelompok:

- 1) Kelompok sasaran untuk rumah tangga, keluarga dan individu menggunakan basis data terpadu (pendataan program perlindungan sosial tahun 2011)
- 2) Kelompok sasaran pendekatan ruang (kewilayahan) menggunakan data pemetaan kampung miskin.

**Tabel 3.4**  
**Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu**  
**di Provinsi Banten**

| NO            | KABUPATEN/<br>KOTA           | JUMLAH RUMAH TANGGA |                |                |                | JUMLAH INDIVIDU |                  |                |                  |
|---------------|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
|               |                              | KEL 1               | KEL 2          | KEL 3          | TOTAL          | KEL 1           | KEL 2            | KEL 3          | TOTAL            |
| 1             | Pandeglang                   | 25.675              | 52.160         | 52.157         | 129.992        | 149.127         | 230.276          | 190.450        | 569.853          |
| 2             | Lebak                        | 25.525              | 57.732         | 57.640         | 140.897        | 167.025         | 251.944          | 194.007        | 612.976          |
| 3             | Tangerang                    | 35.853              | 70.648         | 70.647         | 177.148        | 182.961         | 304.551          | 281.687        | 769.199          |
| 4             | Serang                       | 12.860              | 29.424         | 29.423         | 71.707         | 81.227          | 146.917          | 125.637        | 353.781          |
| 5             | Kota<br>Tangerang            | 23.326              | 16.249         | 16.248         | 55.823         | 117.718         | 72.214           | 66.245         | 256.177          |
| 6             | Kota Cilegon                 | 2.898               | 5.507          | 5.504          | 13.909         | 13.048          | 24.694           | 25.014         | 62.756           |
| 7             | Kota Serang                  | 6.224               | 7.081          | 7.124          | 20.429         | 30.422          | 34.948           | 36.398         | 101.768          |
| 8             | Kota<br>Tangerang<br>Selatan | 4.563               | 7.747          | 7.747          | 20.057         | 22.025          | 35.207           | 31.312         | 88.544           |
| <b>Banten</b> |                              | <b>136.924</b>      | <b>246.548</b> | <b>246.490</b> | <b>629.962</b> | <b>763.553</b>  | <b>1.100.751</b> | <b>950.750</b> | <b>2.815.054</b> |

*Keterangan :*

*Basis Data Terpadu berisikan daftar nama dan alamat 30% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah. Kelompok 1 : Kelompok Paling Miskin (Sangat Miskin dan Miskin), Kelompok 2 : Kelompok Hampir Miskin, Kelompok 3 : Kelompok Rentan*

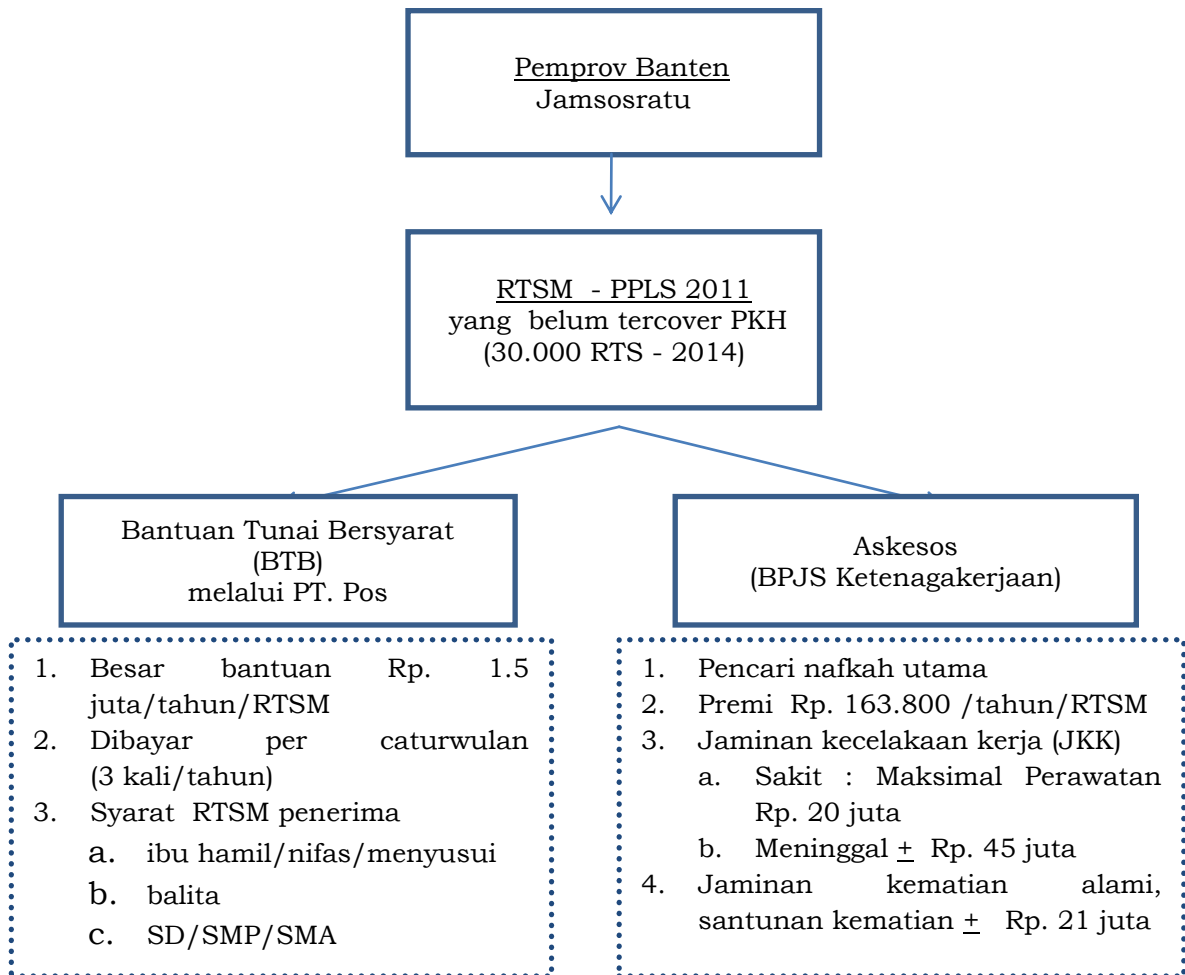
## 5. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2013

### 1) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)

Jamsosratu merupakan skema terpadu dan melembaga untuk menjamin masyarakat yang berasal dari kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mempunyai sistem perlindungan sosial bagi keluarga miskin pekerja sektor informal.

- a. RTSM tidak memiliki jaminan pendapatan yang cukup, karena pada umumnya mereka tidak memiliki mata pencaharian yang pasti dan terbatasnya akses terhadap sistem Jaminan sosial.
- b. Merupakan replikasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dengan menambahkan beasiswa hingga sekolah menengah atas;
- c. RTSM peserta Jamsosratu di asuransikan ke PT. Jamsostek, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK – JK) melalui produk asuransi TKLHK (Tenaga Kerja luar Hubungan Kerja) untuk pekerja sektor informal.
- d. Alokasi anggaran Rp. 3.000.000.000,- untuk tahun 2013 bagi 2.000 RTSM.

- e. Per RTSM mendapatkan Rp. 1.500.000 per tahun diberikan dalam 3 (tiga) termin disalurkan melalui PT. POS
- f. Premi asuransi sebesar Rp 10.400,-/bulan per RTSM melalui PT. Jamsostek
- g. Skema Jamsosratu adalah sebagai berikut :



Berdasarkan data PPLS 2011 (Basis Data Terpadu) jumlah RTSM di Provinsi Banten berjumlah 136.924 RTSM, pada tahun 2013 yang sudah diintervensi melalui program PKH dan Jamsosratu sebanyak 98.163 RTSM, sehingga jumlah RTSM yang belum mendapatkan bantuan melalui kedua program ini sebanyak 38.761 RTSM.

- 2) Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu)
  - a. Kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah kabupaten/kota untuk infrastruktur kecamatan yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
  - b. Anggaran : Rp.154 Milyar, dialokasikan kepada 154 Kecamatan dengan besaran Rp. 1 Milyar setiap kecamatan.



- c. Peruntukan : 94% untuk pembangunan infrastruktur kecamatan dan 6% untuk operasional.
- d. Lokasi : PNPM Mandiri Perdesaan 110 kecamatan, PNPM Mandiri Perkotaan 44 kecamatan.

Gerbangratu pada tahun 2013 telah dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon dengan anggaran Rp. 105 Milyar. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak dapat melaksanakan karena permasalahan administrasi bantuan keuangan dan Rp. 49 Milyar menjadi SilPa di Provinsi Banten.

3) Biaya Operasional (BOP) Raskin

Pelaksanaan program raskin tahun 2012 untuk bulan Januari s/d Mei 2012 mengacu pada pagu raskin kabupaten/kota sesuai data BPS hasil survey PPLS 2008 (629.318 Rumah Tangga Sasaran/RTS), sedangkan untuk bulan Juni s/d Desember 2012 berdasarkan data PPLS 2011 (585.944 RTS) dan setiap RTS menerima raskin sebanyak 15 kg/bln untuk 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600/kg di titik distribusi. Terjadi pengurangan jumlah penerima RASKIN sebanyak 16.503 rumah tangga. Pengurangan ini sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Banten sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Distribusi Raskin Reguler di Provinsi Banten**  
**Tahun 2012**

| NO | KABUPATEN/KOTA         | PAGU RASKIN BULAN<br>JANUARI - MEI 2011                                      |                       | PAGU RASKIN BULAN<br>JUNI - DESEMBER<br>2011                             |                       | PAGU<br>TAHUN<br>2012 | JANUARI - DESEMBER 2012 |           |           |         |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
|    |                        | SK.Gub. Banten No:<br>511.1/Kep.37-<br>Huk/2012 Tanggal :<br>19 Januari 2012 |                       | SK.Gub. Banten No:<br>511.1/Kep.376-<br>Huk/2012 Tanggal : 8<br>Mei 2012 |                       |                       |                         |           |           |         |
|    |                        | RT S-<br>PM PPL<br>S-2008                                                    | Pagu 5 BLN<br>Kg      | RT S-<br>PM PPL<br>S-2011                                                | Pagu 7 BLN<br>Kg      |                       | Kg                      | REALISASI |           | SISA    |
|    |                        |                                                                              |                       |                                                                          |                       | Kg                    |                         | %         | Kg        | %       |
| 1  | 2                      | 3                                                                            | 4=(3X15<br>Kg x 5Bln) | 5                                                                        | 6=(5X15<br>Kg x 5Bln) | 7=4+5                 | 9                       | 11=9/8    | 12        | 13=12/7 |
| I  | SUB DIVRE LEBAK        | 278.522                                                                      | 20.889.150            | 251.222                                                                  | 26.267.310            | 47.267.460            | 46.892.025              | 99,21     | 375.435   | 0,79    |
| 1  | KAB.PANDEGLANG         | 127.318                                                                      | 9.548.850             | 120.637                                                                  | 12.555.885            | 22.215.735            | 21.873.225              | 98,45     | 342.510   | 1,54    |
| 2  | KAB.LEBAK              | 151.204                                                                      | 11.340.300            | 130.585                                                                  | 13.711.425            | 25.051.725            | 25.018.800              | 99,87     | 32.925    | 0,13    |
| II | SUB DIVRE<br>TANGERANG | 216.782                                                                      | 16.323.650            | 236.154                                                                  | 24.781.525            | 41.135.175            | 34.408.425              | 81,69     | 6.726.750 | 16,35   |
| 1  | KAB.TANGERANG          | 172.933                                                                      | 12.959.975            | 164.435                                                                  | 17.270.925            | 30.240.900            | 27.698.865              | 91,59     | 2.542.035 | 8,41    |
| 2  | KOTA.TANGERANG         | 28.546                                                                       | 2.140.950             | 53.045                                                                   | 5.559.830             | 7.710.780             | 3.666.870               | 47,56     | 4.043.910 | 52,44   |
| 3  | KOTA.TANGSEL           | 15.303                                                                       | 1.222.725             | 18.674                                                                   | 1.950.770             | 3.183.495             | 3.042.690               | 95,58     | 140.805   | 4,42    |

| NO              | KABUPATEN/KOTA      | PAGU RASKIN BULAN<br>JANUARI - MEI 2011                                      |                       | PAGU RASKIN BULAN<br>JUNI - DESEMBER<br>2011                             |                       | PAGU<br>TAHUN<br>2012 | JANUARI - DESEMBER 2012 |           |           |         |   |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|---|
|                 |                     | SK.Gub. Banten No:<br>511.1/Kep.37-<br>Huk/2012 Tanggal :<br>19 Januari 2012 |                       | SK.Gub. Banten No:<br>511.1/Kep.376-<br>Huk/2012 Tanggal : 8<br>Mei 2012 |                       |                       |                         |           |           |         |   |
|                 |                     | RT S-<br>PM PPL<br>S-2008                                                    | Pagu 5 BLN<br>Kg      | RT S-<br>PM PPL<br>S-2011                                                | Pagu 7 BLN<br>Kg      |                       | Kg                      | REALISASI |           | SISA    |   |
|                 |                     |                                                                              |                       |                                                                          |                       |                       |                         | Kg        | %         | Kg      | % |
| 1               | 2                   | 3                                                                            | 4=(3X15<br>Kg x 5Bln) | 5                                                                        | 6=(5X15<br>Kg x 5Bln) | 7=4+5                 | 9                       | 11=9/8    | 12        | 13=12/7 |   |
| III             | SUB DIVRE<br>SERANG | 132.004                                                                      | 9.976.050             | 98.517                                                                   | 10.344.285            | 20.320.335            | 19.657.485              | 96,74     | 562.850   | 3,26    |   |
| 1               | KAB.SERANG          | 95.738                                                                       | 7.255.350             | 66.414                                                                   | 6.973.470             | 14.228.820            | 13.565.970              | 95,34     | 562.850   | 4,66    |   |
| 2               | KOTA.CILEGON        | 15.951                                                                       | 1.197.075             | 12.923                                                                   | 1.356.915             | 2.553.990             | 2.553.990               | 100,00    | -         | -       |   |
| 3               | KOTA.SERANG         | 20.315                                                                       | 1.523.625             | 19.180                                                                   | 2.013.900             | 3.537.525             | 3.537.525               | 100,00    | -         | -       |   |
| PROVINSI BANTEN |                     | 627.308                                                                      | 47.188.850            | 585.893                                                                  | 61.393.120            | 108.722.970           | 100.957.935             | 92,86     | 7.665.035 | 7,14    |   |

Permasalahan dalam raskin adalah menjaga indikator 6 T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga dan tepat administrasi). Di beberapa daerah hal ini belum tercapai dengan alasan biaya opsional raskin oleh bulog hanya sampai titik distribusi sementara dari titik distribusi ke penerima manfaat belum tersedia anggaran dan mengakibatkan harga diatas yang sudah ditetapkan.

Untuk meningkatkan efektifitas penyaluran raskin dari titik distribusi sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan program raskin. Diharapkan adanya kepedulian dan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang program raskin melalui penyediaan dana sharing / pendamping melalui APBD-nya antara lain dengan raskinda dan juga untuk mendukung biaya operasional penyaluran raskin, bantuan distribusi ke RTS, biaya sosialisasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi.

**Tabel 3.6**  
**Bantuan Keuangan untuk Biaya Operasional Distribusi Raskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013**

| NO               | KABUPATEN/ KOTA | ANGGARAN      |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Kabupaten</b> |                 |               |
| 1                | Lebak           | 1.438.000.000 |
| 2                | Pandeglang      | 1.267.000.000 |
| 3                | Serang          | 698.000.000   |
| 4                | Tangerang       | 1.728.000.000 |

| NO            | KABUPATEN/ KOTA   | ANGGARAN             |
|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>Kota</b>   |                   |                      |
| 5             | Cilegon           | 136.000.000          |
| 6             | Serang            | 202.000.000          |
| 7             | Tangerang         | 557.000.000          |
| 8             | Tangerang Selatan | 197.000.000          |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>6.223.000.000</b> |

- 4) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Banten
- Setengah juta lebih warga miskin di Provinsi Banten atau tepatnya sebanyak 536.988 warga saat ini belum memperoleh tunjangan kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sehingga pemerintah kabupaten/kota diminta untuk melakukan sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi Banten guna mengurangi jumlah warga yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
- Provinsi Banten dalam hal ini mengeluarkan program Jamkesda dengan rekapitulasi rencana bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota tahun 2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Bantuan Keuangan Jamkesda menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Banten Tahun 2012**

| NO                      | KABUPATEN/ KOTA   | MASYARAKAT<br>MISKIN DI LUAR<br>QUOTA<br>JAMKESMAS | ALOKASI DANA<br>JAMKESDA<br>BERSUMBER APBD<br>KABUPATEN/KOTA | ALOKASI DANA<br>JAMKESDA<br>BERSUMBER<br>APBD PROVINSI |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kabupaten</b>        |                   |                                                    |                                                              |                                                        |
| 1                       | Lebak             | 35.417                                             | 900.000.000                                                  | 500.000.000                                            |
| 2                       | Pandeglang        | 168.390                                            | -                                                            | 1.000.000.000                                          |
| 3                       | Serang            | 116.524                                            | -                                                            | 1.000.000.000                                          |
| 4                       | Tangerang         |                                                    |                                                              |                                                        |
| <b>Kota</b>             |                   |                                                    |                                                              |                                                        |
| 5                       | Cilegon           | 32.914                                             | 1.666.560.000                                                | 600.000.000                                            |
| 6                       | Serang            | 26.720                                             | 2.340.000.000                                                | 780.000.000                                            |
| 7                       | Tangerang         | -                                                  | -                                                            | -                                                      |
| 8                       | Tangerang Selatan | 99.312                                             | 10.000.000.000                                               | 320.000.000                                            |
| <b>Jumlah/ Provinsi</b> |                   | <b>596.675</b>                                     | <b>28.906.560.000</b>                                        | <b>5.000.000.000</b>                                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013

## 6. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014

### 1) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial kepada kabupaten/kota tahun 2014 untuk percepatan pengurangan kemiskinan meliputi :

**Tabel 3.8**  
**Rencana Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014**

| NO           | PROGRAM                  | ANGGARAN (RP)         | SKPD PELAKSANA                        | TARGET                                       |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1            | Jamsosratu               | 45.000.000.000        | Dinas Sosial                          | 30.000 RTSM                                  |
| 2            | Biaya Operasional Raskin | 6.233.000.000         | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 526.178 RTSM                                 |
| 3            | Jamkesda                 | 7.000.000.000         | Dinas Kesehatan                       | Individu yang tidak tercover dalam Jamkesmas |
| 4            | Beasiswa Miskin          | 19.175.300.000        | Dinas Pendidikan                      | 22.885 Siswa (SD, SMP, SMK, SMA)             |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>77.408.300.000</b> | <b>4 SKPD</b>                         |                                              |

### 2) Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014

Berdasarkan pemetaan kampung miskin untuk pembangunan perdesaan terpadu di Provinsi Banten, rencananya Pemerintah Provinsi Banten melalui SKPD akan fokus dalam menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut.

Adapun kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD tahun 2014 dalam rangka mendukung pembangunan perdesaan terpadu Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD tahun 2014 dalam rangka mendukung Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014**

| NO | DINAS / BADAN | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas SDAP    | 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan<br>2. Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan<br>3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang Mampu                       |
| 2  | Dinas Sosial  | 1. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin<br>2. Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan<br>3. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil<br>4. Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial |

| NO | DINAS / BADAN   | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Dindik          | 1. Bantuan Gubernur untuk Siswa Miskin (Bagus)<br>2. Retrival Anak Putus Sekolah<br>3. Bosda<br>4. Pelatihan Lifeskill Warga Belajar Pendidikan Non Formal<br>5. Pengadaan Alat Pembelajaran Kewirausahaan<br>6. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan (Swasta)<br>7. Fasilitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM)<br>8. Bantuan Siswa Miskin (BSM) |
| 4  | Dinkes          | 1. Jamkesda<br>2. Pelayanan Masyarakat Miskin (Baksos, Operasi Katarak, Bibir Sumbing dan Khitanan)<br>3. Sarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu<br>4. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)<br>5. Jampersal<br>6. Makanan Tambahan Gizi Balita                                                                                                             |
| 5  | Distanak        | 1. Fasilitas Pangan dan Hortikultura<br>2. Fasilitas Usaha Peternakan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Disnakertrans   | 1. Padat Karya Infrastruktur dan Produktif<br>2. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | Diskop dan UMKM | 1. Pelatihan Wirausaha Masyarakat<br>2. Bantuan Peralatan Bagi UMKM<br>3. Pembentukan Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | Distamben       | 4. Pembangunan Listrik Pedesaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | BPPMD           | 1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat<br>2. Posyandu<br>3. P2WKSS<br>4. PNPM Mandiri Perdesaan<br>5. Simpan Pinjam Perempuan<br>6. Bumdes                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Kesbangpol      | 1. Fasilitas Kampung Merah Putih<br>2. Fasilitas Babinsa/Babinmas                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Baperpusarda    | 1. Fasilitas Perpustakaan Kampung (Referensi Wira Usaha)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | Balitbangda     | 1. Penerapan Inovasi Daerah untuk Masyarakat Miskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | BKPP            | 1. Raskin dan Raskinda (CPP)<br>2. Pelatihan Keanekaragaman Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | DKP             | 1. Fasilitas Budidaya Perikanan dan Kelautan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | Dishutbun       | 1. Fasilitas Usaha Perkebunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | Disperindag     | 1. Fasilitas Usaha Perdagangan<br>2. Fasilitas Usaha IKM                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | Disbudpar       | 1. Fasilitas Pengembangan Budaya Lokal<br>2. Fasilitas Pengembangan Dukungan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | Biro Kesra      | 1. Bansos Masyarakat Miskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 | Dishubkominfo   | 1. Internet Desa<br>2. Pembinaan dan Pemberdayaan Ojek                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 | Dispora         | 1. Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)<br>2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**7. Rencana Pemetaan Kampung Miskin untuk Pembangunan Perdesaan Terpadu di Provinsi Banten Tahun 2015**

**Tabel 3.10**  
**Pemetaan Kampung Miskin di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015**

| NO | KECAMATAN    | KELURAHAN/DESA | KAMPUNG        |
|----|--------------|----------------|----------------|
| 1  | Cibitung     | Sindangkerta   | Kp Cibongkok   |
| 2  | Patia        | Patia          | Kp. Binglu     |
| 3  | Sindangresmi | Bojongmanik    | Kp. Babakan    |
| 4  | Sukaresmi    | Seuseupan      | Kp Seuseupan   |
| 5  | Mekarjaya    | Rancabugel     | Kp. Karya Jaya |

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

**Tabel 3.11**  
**Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2015**

| NO | KECAMATAN   | KELURAHAN/DESA | KAMPUNG     |
|----|-------------|----------------|-------------|
| 1  | Cigemblong  | Cikaratuan     | Kp Ciondo   |
| 2  | Cigemblong  | Cikaret        | Kp Cisepan  |
| 3  | Curugbitung | Guradog        | Kp Sengkol  |
| 4  | Cirinten    | Parakan lima   | Kp Sedepe   |
| 5  | Cirinten    | Cibarani       | Kp Cinangka |

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

**Tabel 3.12**  
**Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2015**

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | KAMPUNG           |
|----|-----------|----------------|-------------------|
| 1  | Teluknaga | Tanjung Burung | Kp. Suka Bakti    |
| 2  | Teluknaga | Tanjung Burung | Kp. Kebon Kopi    |
| 3  | Pakuhaji  | Kiara Payung   | Kp. Kiara Payung  |
| 4  | Pakuhaji  | Kiara Payung   | Kp. Keramat Jarak |
| 5  | Pakuhaji  | Kiara Payung   | Kp. Gerong        |

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

**Tabel 3.13**  
**Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Serang Tahun 2015**

| NO | KECAMATAN    | KELURAHAN/DESA  | KAMPUNG           |
|----|--------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Bandung      | Pringwulung     | Kp. Pakis Haji    |
| 2  | Tanjung Teja | Bojong Mengteng | Kp. Bojong Tengah |
| 3  | Mancak       | Cikedung        | Kp. Bulakan       |
| 4  | Pamarayan    | Damping         | Kp. Pangendetan   |
| 5  | Tanara       | Bendung         | Kp. Bendung       |

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

**Tabel 3.14**  
**Pemetaan Kampung Miskin Kota Cilegon Tahun 2015**

| NO | KECAMATAN  | KELURAHAN/DESA | KAMPUNG |
|----|------------|----------------|---------|
| 1  | Ciwandan   | Banjarnegara   | -       |
| 2  | Purwakarta | Tegal Bunder   | -       |
| 3  | Gerogol    | Gerogol        | -       |
| 4  | Cibeber    | Cibeber        | -       |
| 5  | Cilegon    | Bagendung      | -       |

*Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)*

**Tabel 3.15**  
**Pemetaan Kampung Miskin Kota Serang Tahun 2015**

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | KAMPUNG                                                         |
|----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Curug     | Sukalaksana    | Kp Cikasir Rt.07 / Rw.03                                        |
| 2  | Walantaka | Cigoong        | Kp Cigoong Rt.001 / Rw.01                                       |
| 3  | Serang    | Cipare         | Kp Sumber Seroja Rt. 005/Rw.15 ; Kp. Sumber Harum Rt.002 /Rw.07 |
| 4  | Tatakan   | Sayar          | Kp Serdang Lor Rt.001/Rw.08                                     |
| 5  | Kasemen   | Margaluyu      | Kp. Margaluyu Rt.001/Rw.08                                      |
|    |           | Kasemen        | Kp. Kedung Cinde Rw.02/Rt.002                                   |
|    |           | Sawah Luhur    | Kp. Jamblang Rt.03 /Rw.02                                       |

*Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)*

**Tabel 3.16**  
**Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Tahun 2015**

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | KAMPUNG |
|----|-----------|----------------|---------|
| 1  | Pinang    | Kunciran Jaya  | -       |
| 2  | Benda     | Pajang         | -       |
| 3  | Cipondoh  | Petir          | -       |
| 4  | Karawaci  | Gerendeng      | -       |
| 5  | Neglasari | Karangsari     | -       |

*Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)*

**Tabel 3.17**  
**Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Selatan Tahun 2015**

| NO | KECAMATAN     | KELURAHAN/DESA | KAMPUNG |
|----|---------------|----------------|---------|
| 1  | Ciputat       | Sarua          | -       |
| 2  | Ciputat Timur | Pondok Ranji   | -       |
| 3  | Pamulang      | Pamulang Timur | -       |
| 4  | Pondok Aren   | Perigi Baru    | -       |
| 5  | Setu          | Bakti Jaya     | -       |

*Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)*

### **3.1.5 Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup**

Luas kawasan hutan saat ini tercatat 226.931,27 Ha atau 26,23% terhadap luas provinsi di Banten. Namun demikian hasil pencitraan satelit, luas vegetasi tutupan lahan sudah mencapai 29,3%. Padahal menurut amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas kawasan lindung seharusnya 30% dari luas wilayah.

Pada tahun 2012, lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis di Provinsi Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah. Hal ini berarti, mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu 117.914 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Masih tingginya luas lahan kritis disebabkan karena kemampuan rehabilitasi lahan belum mampu mengimbangi laju eksploitasi. Kebutuhan hasil hutan kayu setiap tahun tidak pernah berkurang, disisi lain kemampuan peningkatan suplai hasil hutan kayu belum mampu mengimbangnya. Laju eksploitasi setiap tahun di Banten tidak kurang dari 12.000 Ha, sementara kemampuan rehabilitasi baru mencapai 8.000 Ha.

Eksplorasi yang dilakukan dalam kawasan hutan oleh Perhutani dapat dikendalikan secara ketat, namun eksploitasi hasil hutan dari lahan masyarakat agak sulit dimonitor, karena penebangan mengikuti kebutuhan masyarakat (tebang butuh). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila 75% lahan kritis berada di lahan milik. Kondisi ini apabila tidak diimbangi oleh percepatan rehabilitasi dapat menimbulkan dampak lingkungan terhadap DAS yang kurang baik.

Salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka DAS. Keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan akan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan terutama dalam aspek fungsi hidrologi, fungsi perlindungan tanah, stabilitas iklim mikro, penghasil O<sub>2</sub>, penyerap gas-



gas pencemar udara, potensi sumberdaya terbarukan yang dapat dipanen, pelestarian sumberdaya plasma nutfah, perkembangbiakan ternak dan satwa liar serta pengembangan kepariwisataan.

Kebijakan dan langkah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya :

### **1. Pengembangan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).**

Pelaksanaan RHL tidak dilakukan secara parsial dan terkotak-kotak, tetapi lebih diarahkan kepada menggerakkan seluruh komponen masyarakat. Untuk hal tersebut telah dilakukan program “Gerakan Pembangunan Cinta Menanam (Gerbang Intan)” yang merupakan icon daerah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan RHL ini juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah, berupa program “*One Man One Tree (OMOT)*”, *One Billion Indonesian Trees (OBIT)* dan program penyediaan kebun bibit rakyat. Disisi lain BUMN seperti Perhutani, khususnya KPH Banten memprogramkan “Perhutani Hijau” dimana ditargetkan seluruh kawasan hutan tidak ada lagi tanah kosong (semua tertanami).

Gerakan ini menyertakan semua unsur seperti LSM, perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai tingkatan usia melalui kegiatan kebun bibit sekolah, kebun bibit desa, pengembangan ruang terbuka hijau, penanaman kanan kiri sungai dan sekitar mata air, penanaman kanan kiri jalan dan turus jalan, penghijauan halaman, dan penghijauan kompleks perumahan. Berikut ini disajikan gambaran keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di Banten, dimana tahun 2010 ditargetkan penanaman 8.000 ha, tercapai 27.621 ha, tahun 2011 ditargetkan 8.000 ha, tercapai 30.618 ha dan tahun 2012 ditargetkan 8.000 ha dan tercapai 37.745 ha.

### **2. Pemberian insentif bagi daerah konservasi dan pelaku rehabilitasi.**

Daerah konservasi atau daerah hulu memegang peranan penting dalam suatu ekosistem DAS, misal memberikan perlindungan bagi daerah bawahan, menjadi tandon air bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, masyarakat di daerah hulu ataupun daerah konservasi mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah. Oleh karenanya diperlukan adanya pemberian insentif

tertentu bagi daerah dan pelaku yang konsern dalam konservasi dan rehabilitasi lahan.

Provinsi Banten melalui PT. Krakatau Tirta Industri yang dimediasi oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) telah memberikan insentif kepada masyarakat di daerah hulu/konservasi sebagai apresiasi terhadap kepedulian mereka dalam pengelolaan DAS. Bentuk insentif yang diberikan adalah insentif pendapatan dari jasa lingkungan. Insentif ini diberikan kepada masyarakat yang terletak di daerah hulu DAS Cidanau dengan memberikan insentif sebesar Rp1,2 juta/ha/tahun. Insentif diberikan dengan beberapa syarat ketat yaitu jumlah pohon berkayu per hektar minimal 500 pohon. Apabila dalam satu anggota dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat tegakan pohon yang kurang dari ketentuan tersebut, maka seluruh anggota kelompok tidak akan mendapatkan insentif jasa lingkungan tersebut.

**3. Rehabilitasi lahan partisipatif**

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin hari menunjukkan arah yang semakin baik begitu juga seperti yang dilakukan beberapa perusahaan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). CSR tidak diterjemahkan sebagai bantuan dari perusahaan tetapi sebagai bagian investasi jangka panjang, termasuk melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya. Penyelamatan sumber daya alam tersebut antara lain melakukan rehabilitasi lahan dalam rangka perbaikan lingkungan. Kolaborasi pemanfaatan CSR yang diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan ekonomi masyarakat telah berhasil dilakukan, antara lain sebagaimana Tabel 3.18 berikut :

**Tabel 3.18**  
**Bentuk Kegiatan CSR Perusahaan di Provinsi Banten**  
**Tahun 2012**

| NO | KELOMPOK PERUSAHAAN                                                                                   | BENTUK KEGIATAN CSR                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perbankan terdiri dari BNI 46, BTPN, Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri                             | Penghijauan turus jalan, ruang terbuka hijau, bantuan bibit pohon |
| 2  | Asosiasi terdiri dari Forum reklamasi areal bekas tambang, APKO, APKOT, APhi                          | Penghijauan turus jalan, bantuan bibit                            |
| 3  | Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari PTPN VIII, PT SRIWI, PT Cargill Indonesia, Perhutani | Penghijauan turus jalan, bantuan bibit, pengembangan hutan rakyat |

| NO | KELOMPOK PERUSAHAAN                                                               | BENTUK KEGIATAN CSR                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Energi dan pertambangan terdiri dari PT Aneka Tambang, PT Indonesia Power, PT PLN | Penghijauan lingkungan, bantuan bibit, penghijauan turus jalan, ruang terbuka hijau, penghijauan waduk/situ |
| 5  | Perhubungan dan Telekomunikasi terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT Indosat       | Penghijauan lingkungan, bantuan bibit                                                                       |
| 6  | Kesehatan dan lainnya terdiri dari PT Askes, PT Krakatau Tirta Industri           | Penghijauan lingkungan, bantuan bibit, kebun bibit                                                          |

Sumber: BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012

Selain ketiga strategi diatas, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Banten. Adapun upaya penurunan emisi GRK tersebut meliputi 6 (enam) sektor, diantaranya sektor pertanian dan peternakan, sektor kehutanan, sektor limbah, sektor industri, sektor transportasi dan sektor energi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, emisi dominan untuk gas CO<sub>2</sub> di Provinsi Banten adalah dari sektor energi, transportasi dan kehutanan dikarenakan pertumbuhan sektor energi dan pemukiman yang cukup besar sehingga membutuhkan daya listrik atau energi yang cukup besar serta menyebabkan terjadinya perubahan fungsi hutan atau tutupan lahan. Untuk besarnya emisi pada sektor energi disebabkan karena Provinsi Banten memiliki beberapa pembangkit listrik di beberapa kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan sumber emisi yang ditimbulkan dari sisa bahan bakar yang digunakan sebagai tenaga pembangkit. Di sektor pertanian, emisi paling besar adalah sub sektor peternakan, karena potensi pengembangan peternakan baik skala besar maupun skala rumah tangga cukup besar dan dominan. Sedangkan sumber emisi gas metan yang paling besar adalah pada sektor limbah yang ditimbulkan dari hasil limbah sampah domestik yang tidak terpakai.

**Tabel 3.19**  
**Hasil Rekapitulasi Emisi Gas Rumah Kaca Per Sektor**  
**di Provinsi Banten Tahun 2010**

| NO | SEKTOR                   | CO <sub>2</sub> -EQ | CH <sub>4</sub> | SATUAN    |
|----|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 1  | Pertanian dan peternakan | 573.462             | 86.038          | Ton/Tahun |
| 2  | Kehutanan                | 5.861.511           | —               | Ton/Tahun |
| 3  | Limbah                   | 1.871.502           | 3.297           | Ton/Tahun |
| 4  | Industri                 | 27.692.476          | —               | Ton/Tahun |
| 5  | Transportasi             | 3.876.200           | —               | Ton/Tahun |
| 6  | Energi                   | 43.727.720          | —               | Ton/Tahun |
|    | Jumlah                   | 81.800.608          | 115.386         | Ton/Tahun |

Berdasarkan hasil proyeksi dan analisa timbunan emisi GRK maka ada beberapa usulan aksi mitigasi terkait penurunan emisi di provinsi Banten, antara lain:

- a. Usulan aksi mitigasi sektor pertanian
  - a) Pembangunan biogas limbah sapi;
  - b) Penggunaan limbah pertanian dan peternakan lokal.
- b. Usulan aksi mitigasi sektor kehutanan
  - a) Optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif, kosong dan kritis;
  - b) Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan;
  - c) Penyelesaian proses ijin pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan yang bermasalah;
  - d) Penanganan perambahan hutan dan penanganan konflik kawasan lindung dan konservasi;
  - e) Penanaman yang lebih terkendali pada hutan tanaman;
  - f) Peningkatan monitoring hot spot;
  - g) Pengamanan hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan;
  - h) Rehabilitasi tanaman perkebunan;
  - i) Ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan.
- c. Usulan aksi mitigasi sektor limbah
  - a) Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta bidang persampahan;
  - b) Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Terpadu 3 R;
  - c) Pembuatan pedoman pengelolaan sampah;
  - d) Pengelolaan sampah perkantoran;
  - e) Kampanye regulasi;
  - f) Pengomposan (industri besar, UKM, Agrobisnis).
- d. Usulan aksi mitigasi sektor industri
  - a) Workshop pengembangan industri logam, genteng dan bata;
  - b) Industri kecil menengah kimia yang terbina dan terawasi;

- e. Usulan aksi mitigasi sektor transportasi
  - a) Penyelenggaraan keselamatan lalu lintas;
  - b) Penghematan mobil dinas (Inpres 13/ 2011);
  - c) Car Free Day (2 hari per bulan);
- f. Usulan aksi mitigasi sektor energi
  - a) Pelatihan instalasi biogas;
  - b) Pelaksanaan Inpres 13 / 2011;
  - c) Pembangunan PLTMH/Pikohidro;
  - d) Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home System (SHS);
  - e) Sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tersebut, Provinsi Banten melalui BLHD melakukan beberapa strategi yaitu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan pembinaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM, pelayanan informasi, serta meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan strategi tersebut, kebijakan yang diterapkan BLHD mengacu dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan serta pepaduserasian pembangunan wilayah melalui pengintegrasian kawasan didukung infrastruktur wilayah yang berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, yaitu peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kapasitas serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Guna mewujudkan strategi tersebut selama tahun 2012 telah dilaksanakan program-program yaitu program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta program pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS, peningkatan penanganan kerusakan DAS dan SITU/danau di wilayah Provinsi Banten, peningkatan penanganan kerusakan sumber mata air di wilayah Provinsi Banten, pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati, peningkatan kinerja kabupaten dalam meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindung, serta penanganan ekosistem mangrove, pesisir dan laut di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan program pengendalian pencemaran lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan antara lain: penurunan beban pencemaran oleh usaha/ industri, pembinaan dan pengawasan limbah B3 dan B3, peningkatan penggunaan refrigerant (Freon) non CFC, pemantauan kualitas air dan udara ambien di wilayah Provinsi Banten menurut SPM, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengelolaan persampahan, peningkatan SDM dan sarana prasarana untuk Laboratorium lingkungan BLHD, pemantauan dan penilaian Adipura kabupaten/kota se Provinsi Banten, fasilitasi program Adiwiyata, fasilitasi publikasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, fasilitasi operasional komisi penilai amdal dan sekretariat amdal Provinsi Banten, serta tersusunnya laporan pelaksanaan RKL/RPL dokumen lingkungan hidup.

Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada tahun 2012 terwujud dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan limbah domestik dan limbah B3, peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam terwujud dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

sumber daya air; dan kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi sumber daya air.

Program dan kegiatan lain yang dianggap penting untuk pengendalian dan meminimalisir dampak lingkungan terdapat dalam program penataan perumahan, pemukiman dan kawasan sentra produksi, pada tahun 2012 Dinas SDAP melaksanakan kegiatan pembangunan jalan akses sentra produksi kawasan pusat pertumbuhan, peningkatan prasarana lingkungan kawasan binaan, penyediaan prasarana dan sarana air bersih, perencanaan pengembangan infrastruktur bidang sumber daya air dan pemukiman, dan untuk meminimalkan dampak banjir dalam program pengembangan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya air juga dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai di WS Cidurian – Cisadane, pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai di WS Ciliman – Cisawarna.

Berbagai permasalahan yang terkait dengan pencemaran lingkungan masih ditemui di beberapa daerah, seperti rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan kekhawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak di wilayah perbatasan. Pemerintahan Kota Cilegon dipandang kurang atau tidak melakukan inisiatif koordinasi di awal perencanaan dengan Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. Sementara, perijinan pengolahan limbah B3 adalah kewenangan pemerintah pusat yang dalam prosesnya juga melibatkan kebijakan Gubernur Banten.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu pencemaran udara juga merebak pada kawasan permukiman sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Bagendung Kota Cilegon dikarenakan pengelolaan sampah masih tersentralisasi pada level kabupaten/kota yang menggunakan cara ditimbun dan dibakar, walaupun di beberapa kabupaten/kota sudah dirancang menggunakan

teknologi *sanitary landfill*. tapi pada kenyataan dilapangan masyarakat masih melakukan proses open dumping. Sebenarnya pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sederhana dan sangat mudah seperti membiasakan memisahkan sampah organik dan non organik sehingga mudah untuk pengelolaannya, yang organik bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos dan yang non organik bisa dijual untuk dijadikan daur ulang biji plastik dan besi.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. **Otorisasi**, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. **Perencanaan**, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. **Pengawasan**, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. **Alokasi**, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian;
5. **Distribusi**, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan



6. **Stabilisasi**, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. **Disiplin Anggaran**, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

#### **1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah**

##### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan PAD pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

- a. LPE berkisar 6,6 – 6,8%;
- b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 8,34%;
- c. Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar 10,00% per tahun;
- d. Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 6,8% ;
- e. Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2014 kepada lembaga-lembaga keuangan bank meningkatkan besaran deviden pada tahun 2015 sebesar 30%;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB);
- g. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru.

## 2) Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per Tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%;
- b. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.

## 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 0,01% per tahun.

## **2. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah:**

### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung dapat meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui:

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,
- b. Rasionalisasi pajak/retribusi daerah,
- c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan.

Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan target-target pendapatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiayaan.

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan.

Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pertimbangan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;

- c. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).

## 2) Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU TA. 2014 dengan memperhatikan realisasi TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;
- b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH TA. 2014, dan memperhatikan realisasi DBH TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;
- c. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN TA. 2015.

## 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPD Tahun 2015, hal yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2015 yang akan dilakukan adalah:

- a. Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak daerah;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.

### **3. Target Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.270.499.012.000,- , meliputi :

#### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 5.089.671.000.000,-  
Jumlah PAD tersebut diperoleh dari :

- a. Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 4.925.377.000.000 ;
- b. Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 22.970.000.000 ;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp 44.600.000.000 ; dan
- d. Lain-lain PAD Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp. 96.724.000.000 .

#### **2) Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.134.309.012.000,-. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp 405.819.000.000,-;
- b. Dana Alokasi Umum yang ditargetkan sebesar Rp.728.490.012.000,-;

#### **3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.046.519.000.000,- . Dana tersebut diperoleh dari dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Secara lengkap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

**Tabel 3.20**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015**

| NO         | URAIAN                                            | APBD 2014                | RPJMD 2015               | RKPD 2015                |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>6,878,071,982,000</b> | <b>5,487,742,000,000</b> | <b>7,270,499,012,000</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>4,675,126,000,000</b> | <b>4,386,000,000,000</b> | <b>5,089,671,000,000</b> |
| 1.1.1      | Pajak Daerah                                      | 4,473,832,000,000        | 4,251,171,000,000        | 4,925,377,000,000        |
| 1.1.2      | Retribusi Daerah                                  | 66,970,000,000           | 6,735,000,000            | 22,970,000,000           |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 38,600,000,000           | 46,987,000,000           | 44,600,000,000           |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 95,724,000,000           | 81,107,000,000           | 96,724,000,000           |
| <b>1.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                           | <b>1,151,026,982,000</b> | <b>1,097,799,000,000</b> | <b>1,134,309,012,000</b> |
| 1.2.1      | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak      | 405,819,000,000          | 391,261,000,000          | 405,819,000,000          |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum                                 | 728,490,012,000          | 706,539,000,000          | 728,490,012,000          |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus                               | 16,717,970,000           | -                        |                          |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>       | <b>1,051,919,000,000</b> | <b>3,942,000,000</b>     | <b>1,046,519,000,000</b> |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                                  | 5,400,000,000            | 3,942,000,000            | -                        |
| 1.3.2      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus               | 1,046,519,000,000        |                          | 1,046,519,000,000        |

#### **4. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah**

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam pencapaian target pendapatan daerah tahun 2015 sebagai berikut :

- 1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah;
- 5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;

- 6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru;
- 7) Peningkatan kompetensi aparaturnya pemungut pajak daerah;
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah;
- 9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Didalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2015 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

#### **1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 482.500.000.000,- bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA. 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan



adanya pengeluaran pada tahun 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

**2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 42.000.000.000,- diarahkan untuk penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal tersebut khusus untuk PT. PPKD/JAMKRIDA sebesar Rp. 42.000.000.000,-.

Proyeksi Neraca APBD pada tahun 2015 menggambarkan bahwa total Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 7.270.499.012.000-, sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp. 7.710.999.012.000-, mengalami defisit sebesar Rp. 440.500.000.000-, sehingga masih perlu diupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 482.500.000.000,-.

Secara lengkap proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2015**

| NO           | URAIAN                                                 | APBD 2014              | RPJMD 2015             | RKPD 2015              |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3</b>     | <b>PEMBIAYAAN</b>                                      | <b>471,330,050,000</b> | <b>190,000,000,000</b> | <b>440.500,000,000</b> |
| <b>3.1</b>   | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                           | <b>759,418,050,000</b> | <b>200,000,000,000</b> | 482,500,000,000        |
| 3.1.1        | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya                        | 759,418,050,000        | 200,000,000,000        | 482,500,000,000        |
| <b>3.2</b>   | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>288,088,000,000</b> | <b>10,000,000,000</b>  | <b>42,000,000,000</b>  |
| <b>3.2.1</b> | <b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:</b> | <b>288,088,000,000</b> | <b>10,000,000,000</b>  | 42,000,000,000         |
| 3.2.1.1      | LPK/BPR                                                | 10,588,000,000         | 4,000,000,000          | -                      |
| 3.2.1.2      | PT. PPKD / Jamkrida                                    | 27,500,000,000         | 2,000,000,000          | 42,000,000,000         |
| 3.2.1.3      | PT. Bank Banten/PT. BGD                                | 250,000,000,000        | 4,000,000,000          | -                      |
| 3.2.1.4      | Modal Bergulir Ketahanan Pangan                        |                        |                        |                        |
| <b>3.3</b>   | <b>Pembiayaan Netto</b>                                | <b>471,330,050,000</b> | <b>190,000,000,000</b> | <b>440,500,000,000</b> |

### **3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.710.999.012.000,-.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2015 antara lain terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

## 1) Belanja Pegawai

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2015 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja terbesar hibah adalah untuk bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp. 1.046.519.000.000,- atau sebesar 87,6% dari total belanja hibah Rp.1.194.999.000.000,- Sedangkan penganggaran belanja bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial terbesar

adalah untuk program jamsosratu dengan target sasaran keluarga sangat miskin sebanyak 49.000 keluarga dengan bantuan Rp.2.250.000 perkeluarga selama 1 tahun, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.110.250.000.000,-

3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2015, sedangkan pelampauan target TA. 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam APBD Perubahan TA. 2014.

4) Belanja Bantuan Keuangan.

Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan partai politik.

Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan untuk :

- a. Jaminan kesehatan daerah;
- b. Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin;
- c. Infrastruktur;
- d. Revitalisasi pasar tradisional;
- e. Sarana dan prasarana pendidikan;
- f. Prasarana dan sarana kesehatan;
- g. Pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong kemiskinan;
- h. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi;
- i. Up date data/pelaporan pembangunan.

## 5) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
- 2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;
- 4) Capaian target *pro job, pro poor, pro growth, pro enviromental*, dan *MDG's*;
- 5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
- 6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-daerah.
- 7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hibah dan Bansos.

### **3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2015 akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2015. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan yang meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Lingkungan hidup;
- 4) Pekerjaan umum;
- 5) Penataan ruang;
- 6) Perencanaan pembangunan;
- 7) Perumahan;
- 8) Kepemudaan dan olahraga;
- 9) Penanaman modal;
- 10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 11) Kependudukan dan catatan sipil;
- 12) Ketenagakerjaan;
- 13) Ketahanan pangan;
- 14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 16) Perhubungan;
- 17) Komunikasi dan informatika;
- 18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- 19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 20) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 21) Sosial;
- 22) kebudayaan;
- 23) Statistik;
- 24) Kearsipan
- 25) Perpustakaan.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan meliputi :

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pertanian;
- 3) Kehutanan;
- 4) Energi dan sumber daya mineral;
- 5) Pariwisata;
- 6) Industri;
- 7) Perdagangan;
- 8) Ketransmigrasian.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2015 dan RPJMD 2012-2017, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2015 sebagaimana Tabel 3.22 berikut.

**Tabel 3.22**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014-2015**

| NO         | URAIAN                                                                                        | APBD 2014                | RPJMD 2015               | RKPD 2015                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>2</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                                         | <b>7,349,402,032,000</b> | <b>5,677,742,000,000</b> | <b>7,710,999,012,000</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                                                 | <b>4,022,622,861,700</b> | <b>2,755,222,000,000</b> | <b>4,218,874,012,000</b> |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                                                               | 558,508,213,700          | 620,526,648,000          | 594,146,883,750          |
| 2.1.2      | Belanja Hibah                                                                                 | 1,367,549,000,000        | 225,000,000,000          | 1,194,999,000,000        |
| 2.1.3      | Belanja Bantuan Sosial                                                                        | 91,000,000,000           | 30,000,000,000           | 136,250,000,000          |
| 2.1.4      | Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota                                                      | 1,766,695,512,000        | 1,402,886,430,000        | 1,877,351,775,000        |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik | 233,870,136,000          | 466,808,922,000          | 411,126,353,250          |
| 2.1.6      | Belanja Tidak Terduga                                                                         | 5,000,000,000            | 10,000,000,000           | 5,000,000,000            |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                                                       | <b>3,326,779,170,300</b> | <b>2,992,520,000,000</b> | <b>3,492,125,000,000</b> |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai                                                                               |                          | 170,000,000,000          |                          |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa                                                                       |                          | 1,150,000,000,000        |                          |
| 2.2.3      | Belanja Modal                                                                                 |                          | 1,672,520,000,000        |                          |
|            | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                                                      | <b>(471,330,050,000)</b> | <b>(190,000,000,000)</b> | <b>(440,500,000,000)</b> |